

KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK : PERSPEKTIF EFISIENSI & DAYA SAING

Elys Fauziah
Firman Farid Muhsoni
Putri Dwi Utami Nur Hasanah
Laily Yusnita Noviandika
Achmad Syarif Nur Fajrullah
Zasli Purwanto



GET PRESS INDONESIA

KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK : PERSPEKTIF EFISIENSI & DAYA SAING

Penulis: Elys Fauziyah
Firman Farid Muhsoni
Putri Dwi Utami Nur Hasanah
Laily Yusnita Noviandika
Achmad Syarif Nur Fajrullah
Zasli Purwanto

ISBN:

Editor : Mila Sari, M.Si.
Penyunting: Diana Purnama Sari ME.
Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.
Penerbit: GETPRESS INDONESIA
Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:
Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Mei 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku Referensi dengan judul “**Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi dan Daya Saing**”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Penulisan buku ini merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran dan referensi dalam menyoal perubahan kebijakan subsidi pupuk pada tahun 2022. Terdapat perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan subsidi pupuk pada tahun 2022 ini. Dari sisi jumlah pupuk yang disubsidi berkurang dari 6 jenis menjadi 2 jenis. Dan dari sisi komoditas yang awalnya terdapat 72 komoditas yang disubsidi kini hanya tersisa 9 jenis komoditas. Dampak yang dapat ditimbulkan dari perubahan kebijakan ini dapat dilihat dari perspektif efisiensi teknis, ekonomis, maupun daya saing.

Buku referensi ini merupakan edisi perdana, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik, untuk perbaikan konten dari buku tersebut pada edisi selanjutnya. Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan pembuatan buku referensi ini. Harapan terbesar penulis adalah semoga buku ini dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang akan mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing komoditas pangan, khususnya di Pulau Madura.

Wassalam.

Bangkalan, 17 Desember 2023

Penulis

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH KEBIJAKAN PUPUK DI INDONESIA.....	5
BAB III PERSEPSI PETANI MADURA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK 2022	9
A. Persepsi Petani Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep	9
B. Persepsi Petani Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep....	12
C. Persepsi Petani Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep	16
BAB IV EFISIENSI TEKNIS, EKONOMIS USAHATANI PADI, JAGUNG, BAWANG MERAH PASKA KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK 2022.....	21
A. Efisiensi Usahatani Padi Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pupuk 2022 ..	21
B. Efisiensi Usahatani Jagung Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pupuk 2022.....	24
C. Efisiensi Usahatani Bawang Merah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pupuk 2022	27
BAB V DAYA SAING USAHATANI PADI, JAGUNG, BAWANG MERAH PASKA KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK.....	33
A. Daya Saing Usahatani Padi, Jagung, Bawang Merah Paska Kebijakan Subsidi	33
B. Daya Saing Jagung Sesudah Kebijakan Pupuk 2022	37
C. Daya Saing Bawang Merah Sesudah Kebijakan Pupuk 2022	44
D. Daya Saing Padi Sesudah Kebijakan Pupuk 2022	54
DAFTAR PUSTAKA.....	63

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kontribusi Berbagai Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Jawa Timur dalam 3 Tahun Terakhir.	1
Tabel 2. Data Produksi Tanaman Pangan di Pulau Madura Tahun 2022.....	3
Tabel 3. Jumlah Impor 3 Komoditas Pangan Tahun 2020-2021.....	4
Tabel 4. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Sebelum Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.	21
Tabel 5. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Setelah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022	22
Tabel 6. Perbandingan Efisiensi Teknis dan Ekonomis pada Produksi Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.....	24
Tabel 7. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Sebelum Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.	25
Tabel 8. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Setelah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022	26
Tabel 9. Perbandingan Efisiensi Teknis dan Ekonomis pada Produksi Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.....	27
Tabel 10. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Sebelum Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.....	28
Tabel 11. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Setelah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022	30
Tabel 12. Perbandingan Efisiensi Teknis dan Ekonomis pada Produksi Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.....	31
Tabel 13. Formulasi PAM pada Usahatani Jagung, Padi, dan Kedelai	34
Tabel 14. Koefisien, dan Formula Pengukuran Keunggulan Kompetitif dan Komparatif.....	35
Tabel 15. Penggunaan Input Usahatani Jagung di Kecamatan Manding Pada Harga Privat.....	37
Tabel 16. Perhitungan SER.....	39
Tabel 17. Penggunaan Input Pada Harga Sosial.....	40
Tabel 18. Analisis PAM Usahatani Jagung	41
Tabel 19. Analisis PAM Dampak Kebijakan	42
Tabel 20. Rata-Rata Jumlah Penggunaan Input pada Usahatani Bawang Merah Berdasarkan Harga Privat	45
Tabel 21. Perhitungan SER.....	47

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 22. Penggunaan Input dalam Usahatani Bawang Merah Berdasarkan Harga Sosial.....	48
Tabel 23. Hasil Perhitungan Matriks PAM pada Usahatani Bawang Merah Rubaru	49
Tabel 24. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Produk Bawang Merah	51
Tabel 25. Penggunaan Input Berdasarkan Harga Privat pada Usahatani Padi di Kecamatan Gapura	54
Tabel 26. Penggunaan Input Berdasarkan Harga Sosial pada Usahatani Padi di Kecamatan Gapura	58
Tabel 27. Perhitungan Analisis PAM	59
Tabel 28. Analisis PAM Dampak Kebijakan Pemerintah	60

BAB I PENDAHULUAN

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang memiliki kontribusi cukup besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Tercatat Sektor Pertanian masih berada dalam peringkat ketiga, sebagai lapangan usaha penyumbang PDRB Jawa Timur. Namun demikian besaran kontribusinya terus mengalami penurunan, sebagaimana terdapat dalam catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2023), dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 kontribusinya sebesar 11.90 persen, dalam 2 tahun berikutnya (tahun 2021 dan 2022) turun masing-masing menjadi 11.50 persen dan 11.11 persen. Tabel 1. berikut mendiskripsikan kontribusi berbagai kategori tanaman pangan dalam PDRB.

Tabel 1. Kontribusi Berbagai Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB Jawa Timur dalam 3 Tahun Terakhir.

Lapangan Usaha	PDRB atas Harga Berlaku (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
Tanaman Pangan	78707.37	76185.18	81338.18
Hortikultura	27117.37	27666.95	30605.41
Perkebunan	39692.32	42400.95	44111.20
Peternakan	59691.37	63318.44	67336.67
Jasa Pertanian	2977.20	3060.14	3304.91
Kehutanan	10189.31	11291.91	12241.08
Perikanan	54871.13	57915.91	64354.60

Sumber : Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2023.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berasal dari subsektor hortikultura, perkebunan, kehutanan, perkebunan, perikanan, peternakan dan tanaman pangan (Choiroh et al., 2020). Diantara beberapa subsektor tersebut, tanaman pangan memberikan kontribusi yang paling besar (Al, 2023). Besarnya kontribusi tanaman pangan dalam PDRB, tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun petani untuk meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dalam setiap musim. Hal ini dilakukan karena tanaman pangan sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat (Tuminem, 2019). Berbagai upaya yang dilakukan ini, sebagai bentuk implementasi perwujudan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan jumlah produktivitas pertanian adalah dengan memberlakukan kebijakan subsidi pupuk. Tujuan diberlakukan kebijakan subsidi ini diantaranya memberikan bantuan kepada para petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk, agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal (Darwis & Supriyati, 2016). Sebagai ilustrasi pada tahun 2020, peningkatan subsidi pupuk sebesar 14,18% per tahun, dapat meningkatkan produktivitas padi nasional sebesar 1,31% per tahun (Sofyan, 2022). Selain itu pemberian subsidi pupuk dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri (Suparmin et al., 2022). Kebijakan pemberlakuan subsidi pupuk telah dilakukan sejak tahun 1970 dan telah mengalami pergantian sistem penyaluran subsidi lebih dari 5 kali (Darwis & Supriyati, 2016). Perubahan sistem penyaluran subsidi pupuk, dilandasi dengan hasil evaluasi lapang dan beberapa penelitian, yang menyatakan bahwa pemberian subsidi seringkali tidak efektif dalam hal biaya, pencapaian target petani, kurang tepat waktu dan harga, serta mendorong penggunaan pupuk yang berlebihan (Hermawan, 2014), (Naully, 2019). Perubahan sistem penyaluran subsidi pupuk yang terbaru terjadi pada tahun 2022, berdasarkan Permentan Nomer 10 tahun 2022.

Perbedaan subsidi pupuk tahun 2022 dengan tahun sebelumnya adalah (1) hanya ada 2 jenis pupuk bersubsidi yaitu urea dan NPK (sebelumnya terdapat 6 jenis pupuk bersubsidi yaitu ZA, NPK, Urea, SP-36, Pupuk Organik dan Pupuk Cair). (2) hanya terdapat 9 jenis komoditas prioritas yang akan diberi subsidi yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao (sebelumnya terdapat 72 jenis komoditas yang disubsidi). (3) Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu data spasial lahan milik petani, usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui e-RDKK, dan alokasi pupuk bersubsidi kabupaten (Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, 2022).

Madura yang dikenal sebagai Pulau Garam dan didominasi oleh lahan kering, sebagian besar lahannya dikembangkan untuk usahatani tanaman pangan dan beberapa jenis tanaman hortikultura. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur (2023), 60 persen usahatani di Pulau Madura adalah usahatani tanaman pangan (Jagung dan Padi) (Al, 2023). Tabel 2 berikut merupakan data produksi tanaman padi, jagung, dan bawang merah di Madura.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 2. Data Produksi Tanaman Pangan di Pulau Madura Tahun 2022

Kabupaten	Padi (Ton)	Jagung (Ton)	Bawang Merah (ton)
Bangkalan	195323.29	132884	238
Sampang	195600.69	98332	1030
Pamekasan	96723.97	93793	781
Sumenep	221979.41	396067	68761

Sumber : BPS Jawa Timur, 2023.

Jika Produktivitas komoditas pertanian tersebut dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur, maka produktivitas komoditas pertanian di Pulau Madura termasuk kategori rendah, terutama di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Misalnya untuk tingkat produktivitas padi di kedua kabupaten tersebut masuk dalam kategori terendah di Jawa Timur yaitu masing-masing hanya mencapai 48.71 kuintal/hektar dan 49.47 kuintal/hektar (Al, 2023). Perubahan pola penyaluran subsidi pupuk tahun 2022, disinyalir berdampak pada penurunan produktivitas padi, jagung, dan bawang merah di Kabupaten Sumenep. Produktivitas padi di Kabupaten Sumenep dalam 2 tahun terakhir (2021 dan 2022) menurun masing-masing sebesar 0.1 kuintal/hektar, 1.2 kuintal/hektar dan 1.7 kuintal/hektar. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris, penurunan penggunaan pupuk sebagai akibat dari pembatasan volume subsidi pupuk dan naiknya harga pupuk dapat menyebabkan penurunan produktivitas tanaman pangan (Hermawan, 2017), (Naully, 2019), (Ślusarczyk & Grondys, 2019), (Dwiharto, 2020), (Sosial et al., 2017), (Marwanti, 2022), (Suparmin et al., 2022). Hal ini menyebabkan petani tidak dapat memproduksi secara efisien baik teknis, alokatif maupun ekonomis. Penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan rekomendasi, seringkali menjadi penyebab petani kurang mampu untuk memproduksi dengan potensi yang tertinggi, begitu juga dengan penggunaan pestisida, benih, dan tenaga kerja (Siallagan et al., 2014), (Astuti et al., 2020), (Skevas & Serra, 2016), (Ahmad & Wibowo, 2021).

Produksi komoditas padi, jagung dan bawang merah di Pulau Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep, selain dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan internal, produk tersebut juga dijual ke pasar internal maupun eksternal. Ketiga produk tersebut masuk dalam kategori produk komersial yang memiliki permintaan cukup besar, dan belum dapat dipenuhi oleh produksi internal. Hal ini diindikasikan dengan adanya impor ketiga produk tersebut dalam 2 tahun terakhir (2020 dan 2021)(Kusnandar, 2022).

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 3. Jumlah Impor 3 Komoditas Pangan Tahun 2020-2021

Komoditas	Jumlah Ekspor (Ribu Ton)	
	2020	2021
Beras	356.29	407.74
Jagung	865.65	8.99
Bawang Merah	22908	25457

Sumber : Databoks, 2023

Peran komoditas padi, dan jagung, serta bawang merah, sangat penting dalam sistem pangan di Indonesia (Suryana & Agustian, 2016). Sehingga sangat rasional jika pengembangan produk-produk tersebut menjadi prioritas hampir di sebagian besar wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Sumenep. Penguatan daya saing ketiga produk tersebut akan mendorong penguatan ekonomi wilayah, dan akan meningkatkan kesejahteraan petani (Wanto, 2017), (Martadona & Maifianti, 2019). Namun apabila terjadi perubahan kebijakan pola subsidi pupuk yang menyebabkan kemampuan petani dalam mengalokasikan pupuk menjadi berkurang, maka akan berdampak pada daya saing produk. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan pupuk akan berpengaruh kepada produksi, sedangkan produksi akan mempengaruhi daya saing produk (Wanto, 2017). Buku ini akan membahas tentang sejarah kebijakan subsidi pupuk, persepsi petani terhadap implementasi kebijakan pupuk 2022, kajian efisiensi teknis, ekonomis, dan daya saing pasca diberlakukan kebijakan pupuk 2022.

BAB II

SEJARAH KEBIJAKAN PUPUK DI INDONESIA

Pemberian pupuk subsidi telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Berdasarkan sistem subsidi dan sumber pembiayaannya, sejarah dari kebijakan subsidi pupuk terbagi menjadi lima periode yaitu :

1. Periode 1970-1998 : sistem subsidi yang diberikan pemerintah yaitu subsidi harga, dimana sumber dana yang membiayai kebijakan ini adalah APBN. Ada dua jenis subsidi yang berlaku selama periode ini yaitu : (1) tahun 1970-1973 dimana subsidi yang diberikan berupa subsidi impor yang diperoleh dari bantuan PLN; (2) tahun 1997-1998 subsidi yang berlaku adalah harga pupuk yang diperoleh dari produksi dalam negeri dan impor pupuk (Abdullah & Hakim, 2011). Berdasarkan SK. Menkeu RI NO.207/KMK.016/1998 yang mengatur tentang penghapusan subsidi pupuk, dimana kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan persaingan pasar sehat antara pelaku distribusi pupuk (Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia, 1998). Pencabutan subsidi pupuk oleh pemerintah menjadikan harga pupuk Urea mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.115/kg; SP-36 menjadi Rp. 1.600/kg; KCl menjadi Rp. 1.650/kg, dan ZA juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 1000/kg (Widowati et al., 2004).
2. Periode 1999-2001 : Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 yang menjadikan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berakibat pada pencabutan subsidi harga pupuk karena harga pupuk non-subsidi terlalu mahal. Perusahaan produsen pupuk kemudian diberikan subsidi berupa *Insentif Gas Domestik* (IGD) oleh pemerintah dengan kata lain pemerintah memberikan subsidi bahan baku (gas) dengan harga gas US\$ 1,3/MMBTU. Selisih antara harga gas yang ada di pasaran dengan harga gas yang disediakan pemerintah untuk produsen pupuk menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembiayaan subsidi diperoleh dari dana APBN dan dana talangan PNBPN Migas, yang mana dana PNBPN diperoleh dari bagi hasil migas antara perusahaan kontraktor dengan pemerintah yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam negeri (Darwis & Supriyati, 2016). PT PUSRI (Pupuk Sriwijaya) menjadi satu-satunya distributor pupuk yang mempunyai fasilitas gerbong kereta api, kapal, pengantongan, dan gudang. Selain itu PUSRI juga mampu mengadakan subsidi silang atau relokasi (Abdullah & Hakim, 2011). Pada SK Menperindag No.93/MPP/Kep/2001 pemerintah kembali mengatur tataniaga pupuk Urea yang berisi tentang peraturan tataniaga pupuk, yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi, kualitas hasil pertanian, serta menghapuskan monopoli pemasaran.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Sehingga harga pupuk mampu dijangkau petani dengan ketersediaan jumlah pupuk yang cukup (Kementrian Perindustrian dan Perdagangan, 2001).

3. Periode ketiga antara tahun 2003-2005 : Selama tahun 2001-2002 subsidi diberikan dalam bentuk Insentif Gas Domestik (IGD) sebagai bahan baku untuk memproduksi pupuk Urea. Disamping itu terjadi peningkatan harga pupuk dunia, yang membuat pemerintah perlu mengatur harga pupuk domestik untuk membantu petani, dan mencegah dampak negatif terhadap kinerja sektor pertanian. Oleh sebab itu, pada tahun 2003 pemerintah meningkatkan dan memperluas subsidi gas untuk pupuk Urea sampai subsidi harga untuk pupuk SP-36, ZA, dan NPK. Mekanisme kebijakan subsidi pupuk pada periode ini dilakukan melalui kombinasi antara subsidi gas untuk pupuk Urea dan subsidi harga untuk pupuk non-Urea dengan sumber pembiayaan berasal dari APBN. Subsidi gas diberlakukan dengan ketentuan harga gas sebesar US\$ 1,0/MMBTU untuk perusahaan produsen pupuk. Jika terdapat selisih harga gas subsidi dengan harga pasaran maka akan dibayar oleh pemerintah (Darwis & Supriyati, 2016). Pemberlakuan subsidi gas dilakukan dengan pertimbangan perlunya amoniak dari hasil reaksi gas metana (CH_4) dari gas bumi untuk memproduksi pupuk Urea. Subsidi harga untuk pupuk non-Urea dihitung menggunakan penjumlahan Harga Pokok Produksi (HPP) dan biaya distribusi, lalu dikurangi Harga Eceran Tertinggi (HET) dikalikan volume produksi (Abdullah & Hakim, 2011). Maka petani yang membeli pupuk non Urea menggunakan harga HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi kebijakan subsidi tersebut terdapat kelemahan yang menjadikan kurang efektif dalam menjamin HET yang disebabkan tingginya harga pupuk eceran di tingkat petani dibandingkan HET pupuk yang berlaku, volume penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dipastikan, serta wilayah tanggung jawab distribusi tidak dapat dipisah dengan tegas (wilayah tanggung jawab pabrik pupuk berdasarkan pada wilayah provinsi yang tidak mungkin diisolir). Sehingga munculnya pembaharuan sistem subsidi pupuk sejak semester II Tahun Anggaran 2006 dengan mekanisme subsidi pupuk harga (Rachman, 2009).
4. Periode keempat antara tahun 2006-2011, pemerintah memberikan subsidi berupa subsidi harga dengan sumber pembiayaan dari APBN. Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan (Kementrian Pertanian, 2022a). Mekanisme subsidi harga ini dihitung selisih antara HET dengan HPP dan biaya distribusi dikalikan volume produksi yang merupakan angka subsidi yang ditanggung pemerintah. Pada tahun 2009 mekanisme distribusi dengan menerapkan sistem Rencana

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan cara menyusun kebutuhan pupuk setiap wilayah untuk memudahkan perkiraan kebutuhan volume pupuk dan kebutuhan biaya.

5. Periode 2012-2021 : pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sebagaimana pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor, dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing (Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2021). Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tentang penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi. Pada penetapan Peraturan Menteri ini berlaku, kantong pupuk bersubsidi yang telah diproduksi dan beredar di wilayah Indonesia harus diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu Paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya peraturan ini (Kementerian Pertanian, 2022) .Sesuai Permentan No. 69 Tahun 2016, dijelaskan bahwa pengecer resmi pupuk (kios resmi) wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani, petambak, dan atau kelompok tani sesuai HET yang sudah ditetapkan Kementan tersebut (Agustian *et al.*, 2017). HET berlaku bagi pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg untuk pupuk urea, SP-36, ZA, dan NPK, serta kemasan 40 kg untuk pupuk organik. Dalam kurun waktu 2003-2016, HET pupuk bersubsidi untuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK mengalami peningkatan antara 3,17-4,41%/tahun. Khusus untuk pupuk Urea, peningkatannya sebesar 4,41%/tahun, sedangkan untuk pupuk ZA peningkatan harganya sebesar 3,73%/tahun (Agustian *et al.*, 2017). Sejak tahun 2016 pemerintah memberlakukan penggunaan kartu tani sebagai sarana penyaluran pupuk subsidi, pendataan petani, kartu penebusan sarana produksi pertanian, penerima pinjaman dan bantuan, serta sebagai kartu penjualan hasil panen. Kartu tani ialah kartu debit untuk transaksi petani yang bergabung dalam kelompok tani termasuk di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Syarat mendapatkan kartu tani salah satunya petani memiliki luas lahan tidak lebih dari dua hektar.
6. Periode 2022 – sekarang : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1463) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Kementerian Pertanian, 2022b). pada tahun 2022 terjadi perubahan kebijakan subsidi pupuk dimana pupuk bersubsidi diberikan kepada petani yang melakukan usahatani subsektor tanaman pangan (padi,jagung, kedelai), subsektor hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), dan subsektor perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi). Petani yang

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

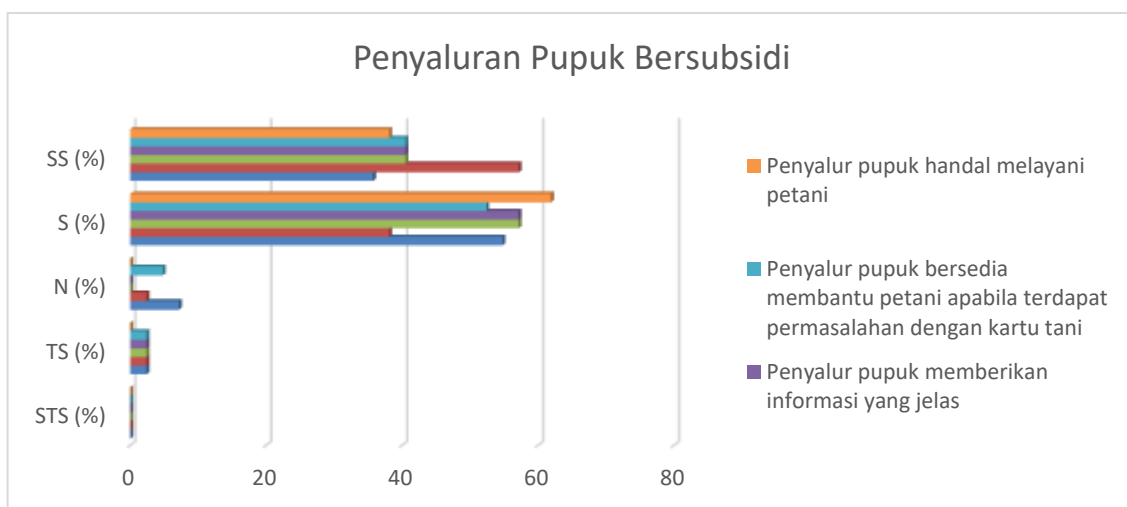
mendapatkan subsidi pupuk harus tergabung dalam kelompok tani dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) (Kementrian Pertanian, 2022).

BAB III

PERSEPSI PETANI MADURA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK 2022

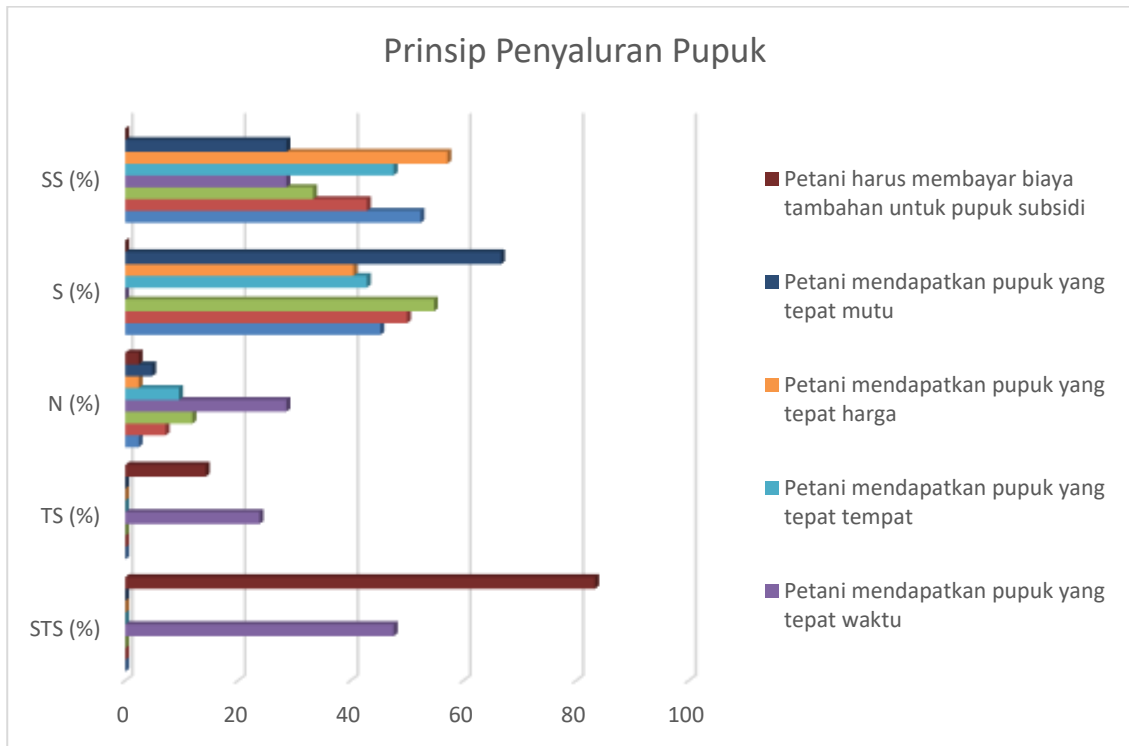
A. Persepsi Petani Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep

Perubahan kebijakan subsidi pupuk pada tahun 2022, diikuti oleh petunjuk teknis yang detail untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai sasaran, tepat waktu, dan efektif. Deskripsi mengenai implementasi teknis pelaksanaannya menurut petani padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep dapat dilihat dalam bar chart berikut. Berdasarkan indikator proses penyaluran pupuk bersubsidi didapatkan gambaran bahwa lebih dari 90 persen petani padi menyatakan setuju bahwa penyalur pupuk melakukan tugasnya secara profesional. Mereka berkenan untuk membantu petani jika terjadi permasalahan dalam penggunaan kartu tani, dan mampu memberikan informasi yang jelas.



Sedangkan dari indikator prinsip penyaluran pupuk, diperoleh fakta bahwa lebih dari 80 persen petani menyatakan bahwa tidak terdapat tambahan biaya dalam pembelian pupuk bersubsidi. Mereka juga menyetujui bahwa pupuk bersubsidi yang mereka terima memiliki mutu dan harga yang tepat serta mudah dijangkau (tersedia di sekitar desa mereka tinggal). Namun dari sisi ketersediaan, lebih dari 60 persen mereka menyatakan bahwa ketersediaannya tidak tepat waktu saat pupuk dibutuhkan oleh petani.

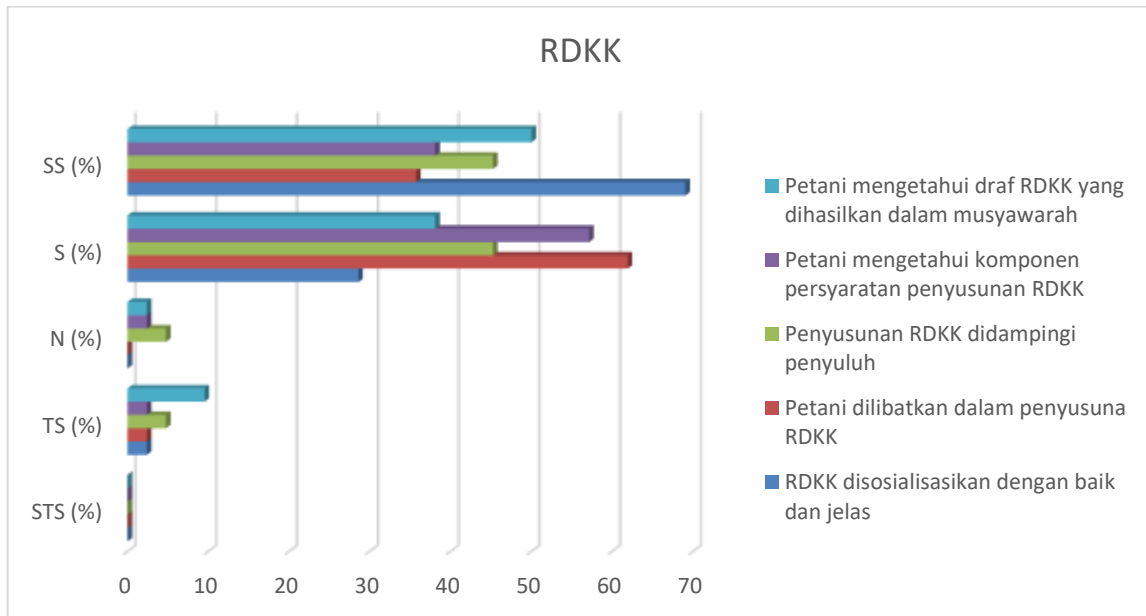
Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing



Berdasarkan indikator penyusunan RDKK, lebih dari 80 persen petani padi menyatakan bahwa petani memahami draf awal RDKK yang disusun dalam kelompok tani secara musyawarah. Mereka juga memahami tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan RDKK. Petani mengaku dalam penyusunan RDKK mereka didampingi oleh para penyuluh.

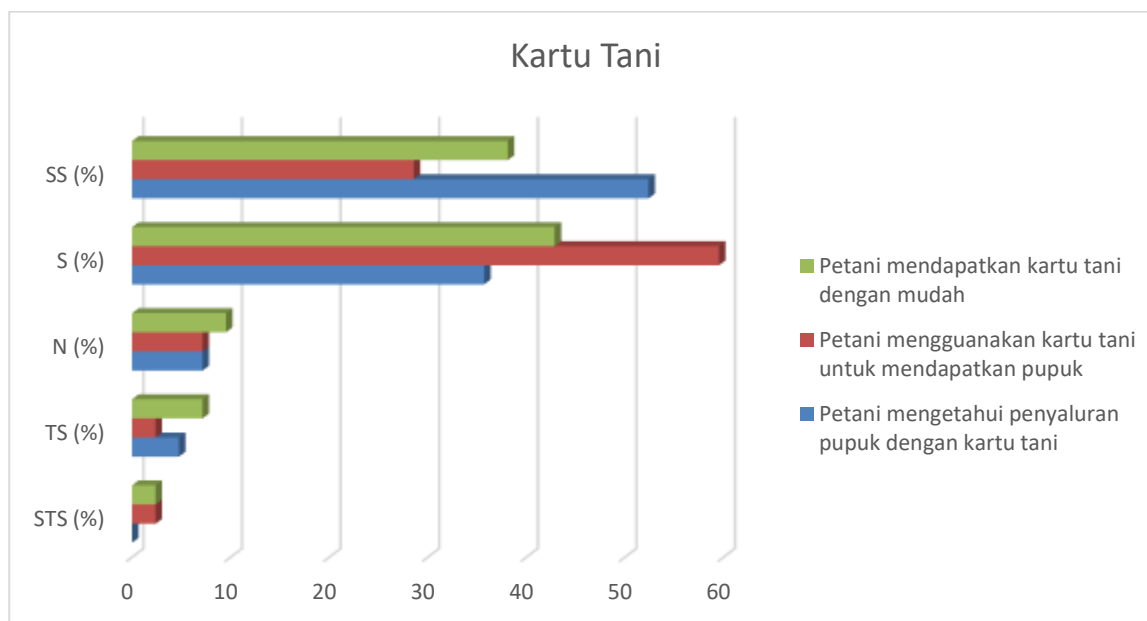
Hasil penyusunan RDKK ditingkat kelompok akan digabungkan oleh penyuluh ditingkat gapoktan, selanjutnya akan digabungkan di tingkat kecamatan, dan kemudian digabung ditingkat kabupaten untuk dibuatkan SK oleh Bupati, dan dikirim ke Provinsi. Usulan RDKK akan diakumulasi di tingkat Provinsi dan diajukan ke kementerian disertai dengan SK Gubernur.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

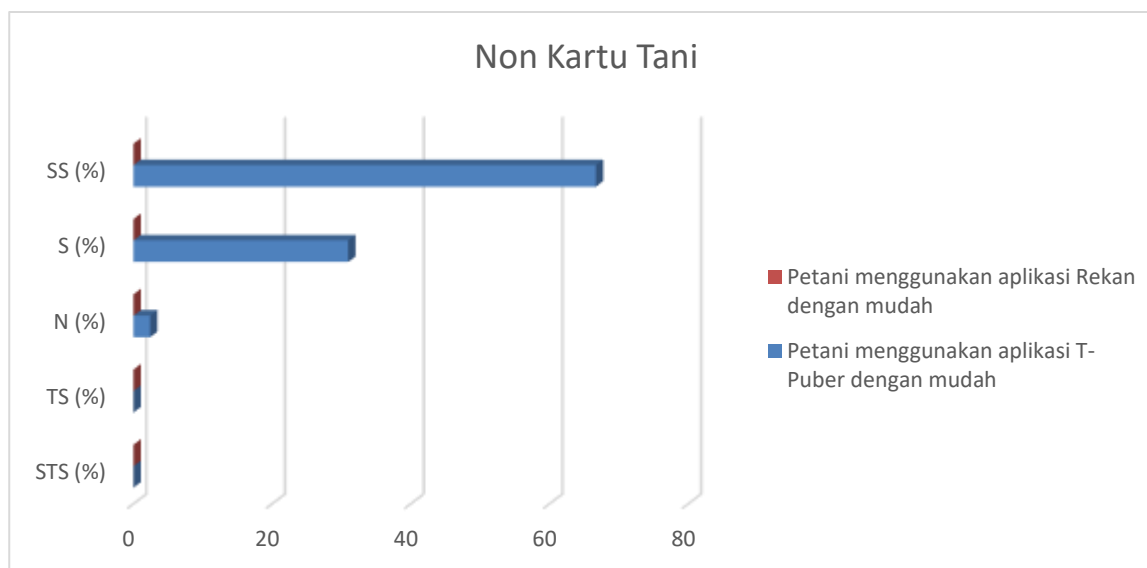


Salah satu terobosan yang diperkenalkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah penebusan pupuk dengan menggunakan kartu tani. Apabila akan menebus pupuk maka petani membawa kartu tani ke kios, kemudian akan digesek pada alat EDC, yang telah terhubung dengan data e-alokasi. Lebih dari 70 persen petani mengatakan bahwa kartu tani diperoleh dengan cara yang mudah. Hal ini mereka nyatakan karena pada saat itu di Kecamatan Gapura dijadikan sebagai pilot project penggunaan kartu tani. Jadi petani tidak mengurus secara mandiri, dan kartu tersebut langsung dibagikan kepada petani. Namun dalam perjalanannya yaitu sejak tahun 2021, banyak hambatan yang ditemui pada kartu tani diantaranya 1) banyak kartu tani yang sudah expired masa berlakunya, alat gesek kartu tani banyak yang rusak, 2) bagi petani pengurusan kartu tani terlalu rumit, dan 3) di kabupaten hanya ada 1 bank yang melayani kartu tani sehingga pengurusannya sangat lama.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing



Saat ini semua petani di kabupaten Sumenep menggunakan T-Puber untuk menebus pupuk bersubsidinya, petani cukup menunjukkan KTP, difoto, dicatat transaksinya dan dimasukkan datanya ke T-puber. Penebusan pupuk dapat dilakukan secara kolektif melalui kelompok



B. Persepsi Petani Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep

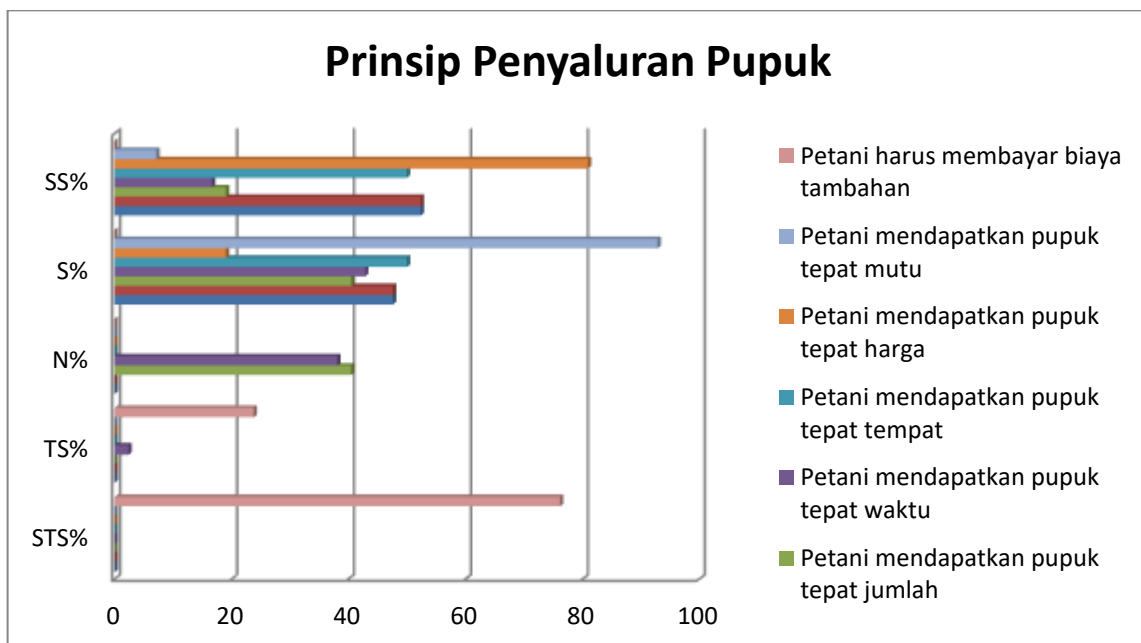
Persepsi petani jagung di Kecamatan Manding terhadap implementasi kebijakan subsidi pupuk tidak jauh berbeda dengan persepsi petani padi di Kecamatan Gapura. Berdasarkan indikator prinsip penyaluran pupuk maka mereka menyatakan bahwa dalam penebusan pupuk subsidi tidak terdapat biaya tambahan yang dikenakan. Sedangkan untuk mutu mereka berpersepsi bahwa mutu pupuk yang diberikan terjamin baik, namun dari sisi waktu masih banyak yg berpendapat bahwa netral,

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

artinya mereka tidak bisa memberikan opini ketidaktepatan waktu penyaluran pupuk. Hal ini berbeda dengan petani yang ada di Kecamatan Gapura.

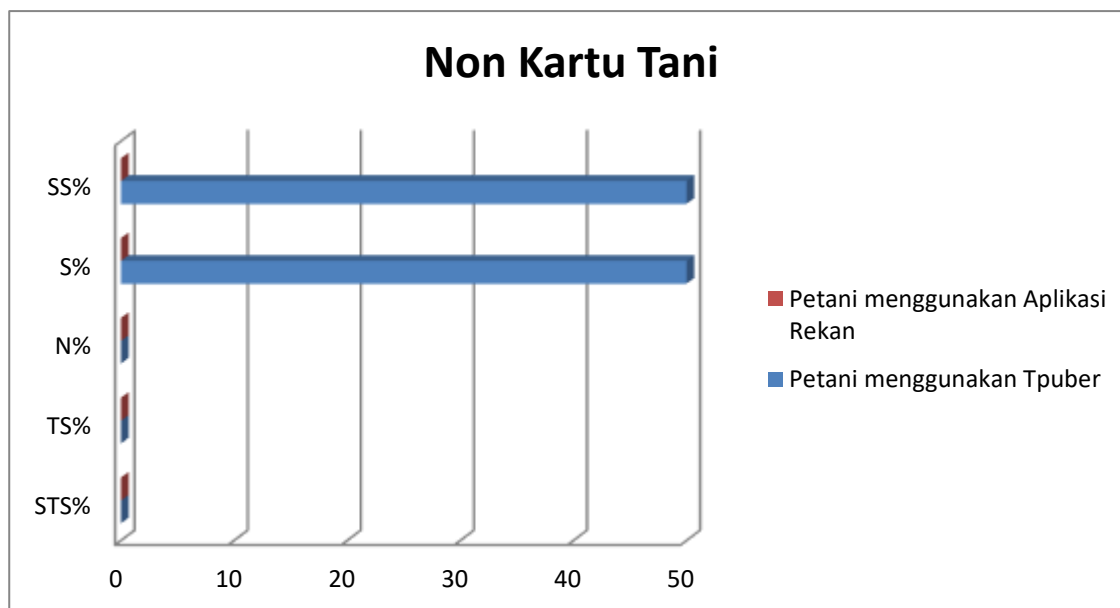
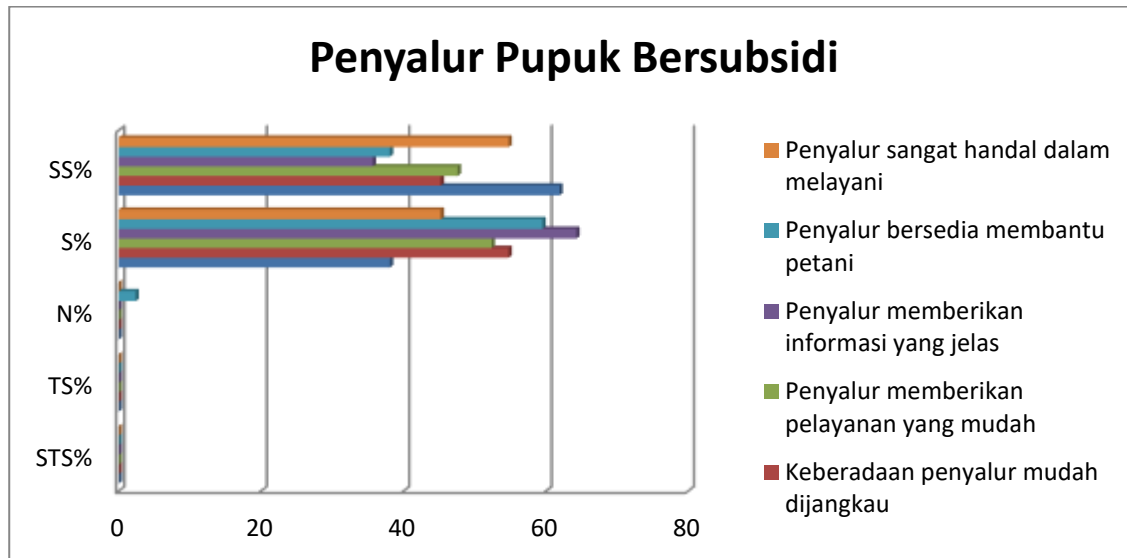
Penjelasan ketidaktepatan waktu penyaluran pupuk didapatkan dari forum FGD. Dalam forum tersebut dijelaskan penyaluran pupuk sering tidak tepat waktu, ketersediaan pupuk tidak ada saat dibutuhkan oleh petani, hal ini karena masa tanam yang dilakukan oleh petani tidak sama dengan periode penganggaran. Petani Musim Tanam I dimulai bulan Januari namun pemberian subsidi pupuk tidak tersedia karena dengan alasan anggaran belum diputus dan SK dari kementerian belum turun ke Pabrik sehingga pihak penyalur tidak berani untuk mendistribusikan. Keterlambatan pemupukan bisa terjadi sampai 2 bulan, hal ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman.

Kasus tidak tepat juga terjadi karena ada kebijakan realokasi pupuk dari provinsi sehingga pada akhir tahun 2022 petani yang membutuhkan pupuk tidak tersedia di kios. Alasan yang dikemukakan oleh provinsi adalah pada saat monev pertengahan tahun, jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Sumenep masih banyak yang belum terserap. Sementara di kabupaten lain di Jawa Timur banyak yang kekurangan. Tidak terserapnya pupuk karena pola tanam di Kabupaten Sumenep berbeda dengan di lokasi lain di Jawa Timur. Hal ini karena kondisi lahan dan sistem pengairan yang tidak intensif, sehingga pada masa kemarau banyak yang tidak melakukan usahatani. Sehingga terkesan serapan sedikit. Tetapi di awal musim hujan kebutuhan pupuk meningkat sangat signifikan. Tetapi karena terlanjur direalokasikan maka banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk sesuai jatahnya



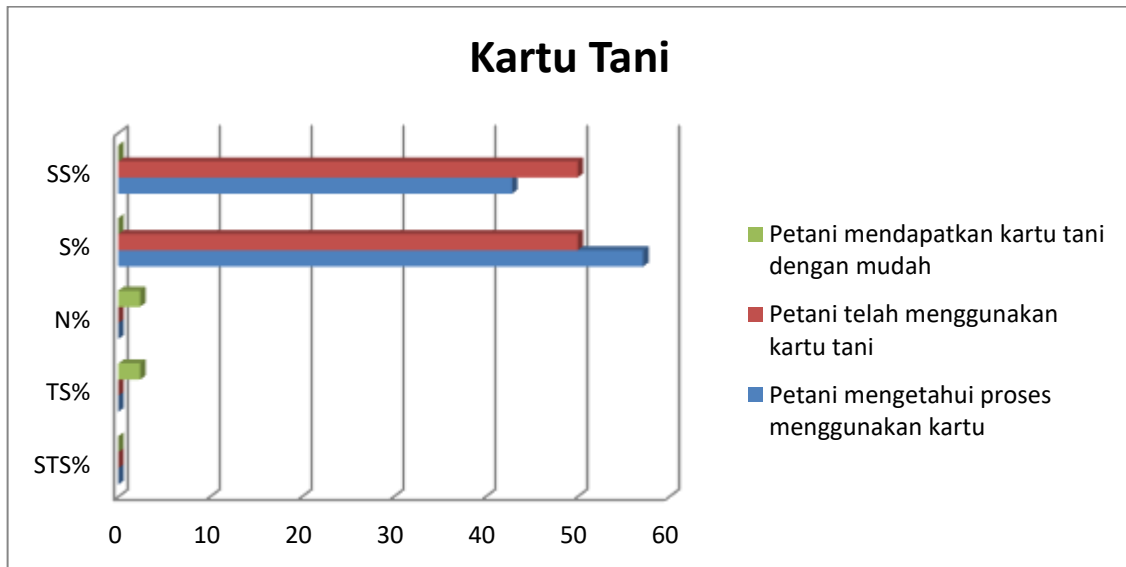
Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Berdasarkan indikator penyaluran pupuk sebagian besar petani jagung di Kecamatan Manding, menyetujui bahwa penyalur pupuk bersubsidi ditangani oleh pihak yang professional yang bersedia untuk membantu petani apabila mereka mengalami kesulitan. Petani juga berpendapat bahwa ketersediaan pupuk mudah dijangkau dan pelayanan yang diberikan penyalur sangat responsif.

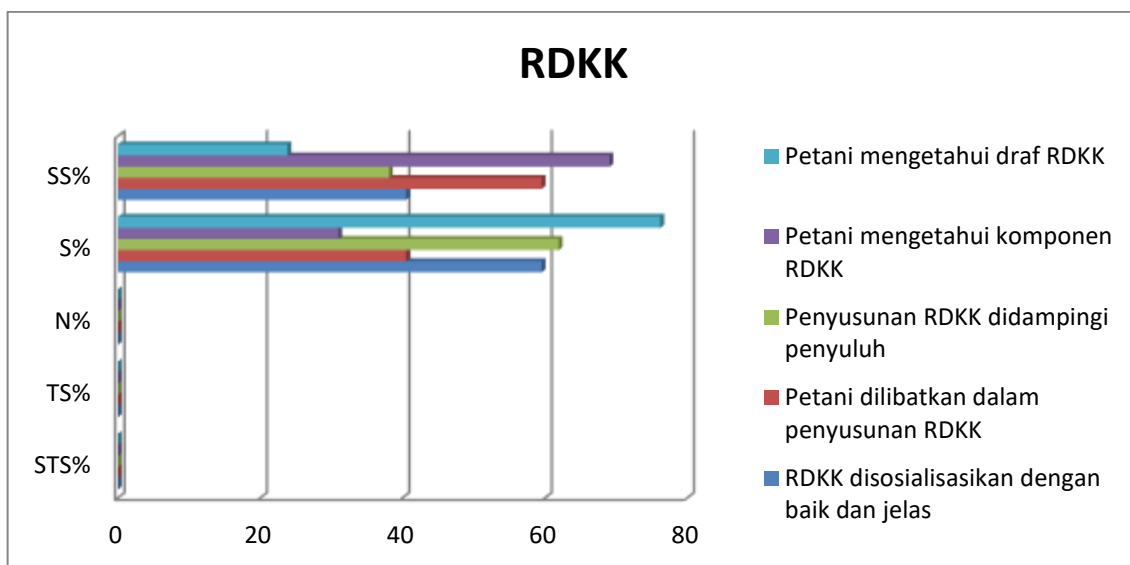


Pada saat ini petani jagung di lokasi penelitian hanya menggunakan aplikasi T-Puber. Saat ini semua petani di kabupaten Sumenep menggunakan T-Puber untuk menebus pupuk bersubsidinya, petani cukup menunjukkan KTP, difoto, dicatat transaksinya dan dimasukkan datanya ke T-puber. Penebusan pupuk dapat dilakukan secara kolektif melalui kelompok.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing



Pada tahun 2021 petani jagung menggunakan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi. Penggunaan kartu tani tidak bertahan lama karena banyak terdapat kelemahan untuk operasionalnya, seperti disebutkan dalam penjelasan di atas.

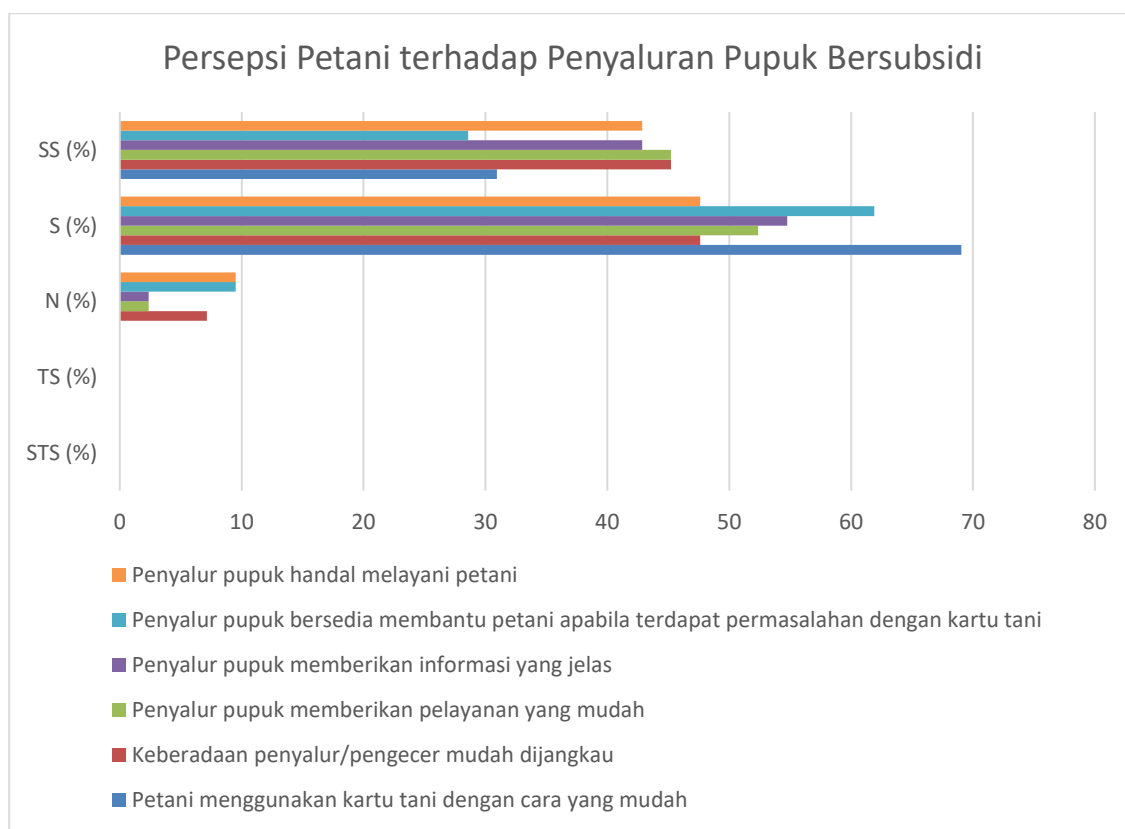


Penyusunan RDKK di wilayah Kecamatan Gapura dilakukan dengan melalui musyawarah di kelompok tani. Petani memahami persyaratan yang digariskan dalam penyusunan RDKK tersebut, diantaranya terdapat pembatasan jumlah lahan yang dimiliki. Pada saat penyusunan mereka didampingi oleh petugas penyuluhan. Data dari kelompok tani pada masing-masing kecamatan akan digabung ditingkat Gapoktan. Selanjutnya akan diserahkan ke Kabupaten untuk diserahkan ke provinsi Jawa Timur, melalui SK Bupati.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

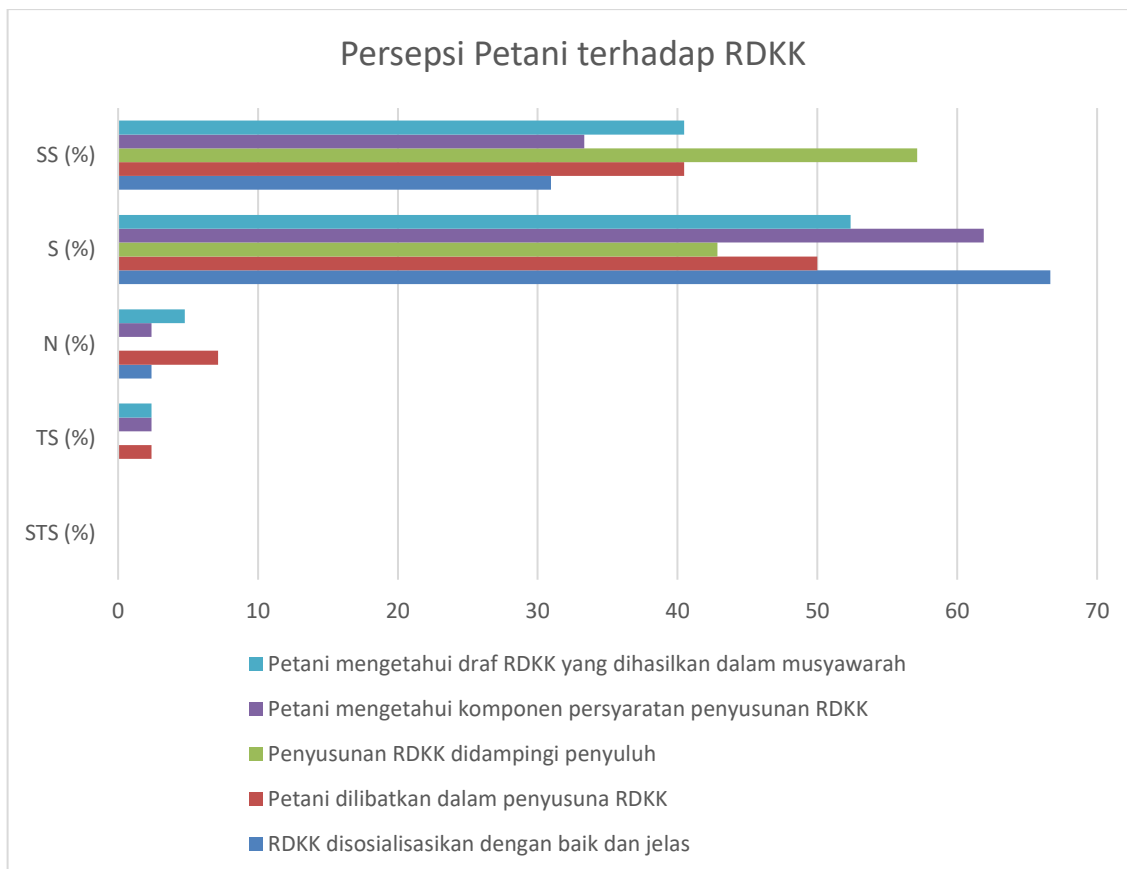
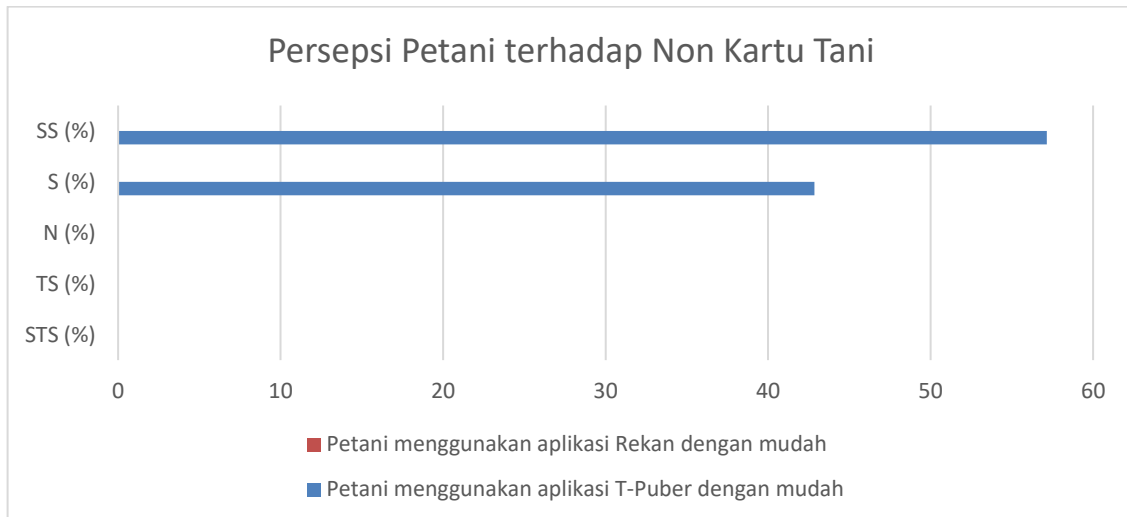
C. Persepsi Petani Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep

Persepsi petani bawang merah di Kecamatan Rubaru terhadap perubahan kebijakan subsidi pupuk 2022, tidak jauh berbeda dengan petani jagung dan padi di dua kecamatan berbeda di wilayah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan indikator penyaluran pupuk bersubsidi, lebih dari 90 persen petani berpersepsi bahwa penyalur pupuk sangat handal dalam memberikan pelayanan kepada petani. Disamping itu keprofesional para penyalur pupuk dirasakan oleh sebagian besar petani bawang merah. Keberadaan para penyalur mudah dijangkau karena berlokasi di wilayah kecamatan dimana mereka tinggal.



Dalam indikator penggunaan non kartu tani, para petani bawang setuju bahwa penggunaan T puber lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan kartu tani. Kartu tani pernah digunakan pada tahun 2021, namun untuk tahun 2023 ini semua petani bawang merah menggunakan T puber untuk penebusan atau pembelian pupuk bersubsidi.

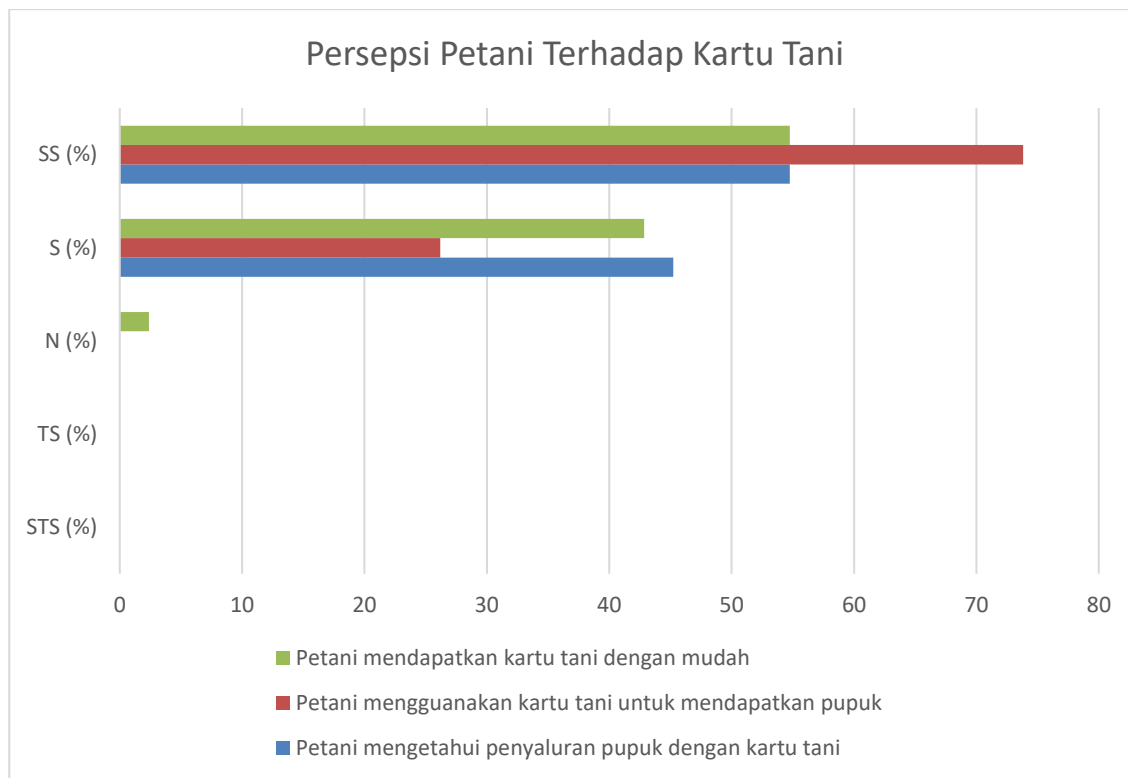
Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing



Pembuatan RDKK dilakukan oleh petani bawang merah melalui kelompok tani yang diikuti. Mereka memusyawarahkan RDKK dengan didampingi oleh petugas penyuluh lapangan. Walaupun demikian masih terdapat petani yang mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan RDKK. Ini diakui oleh sekitar 4 persen petani bawang merah. Para petani bawang merah mengakui bahwa penyusunan RDKK telah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelum penyusunan RDKK tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh petugas penyuluh dalam forum pertemuan kelompok tani.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

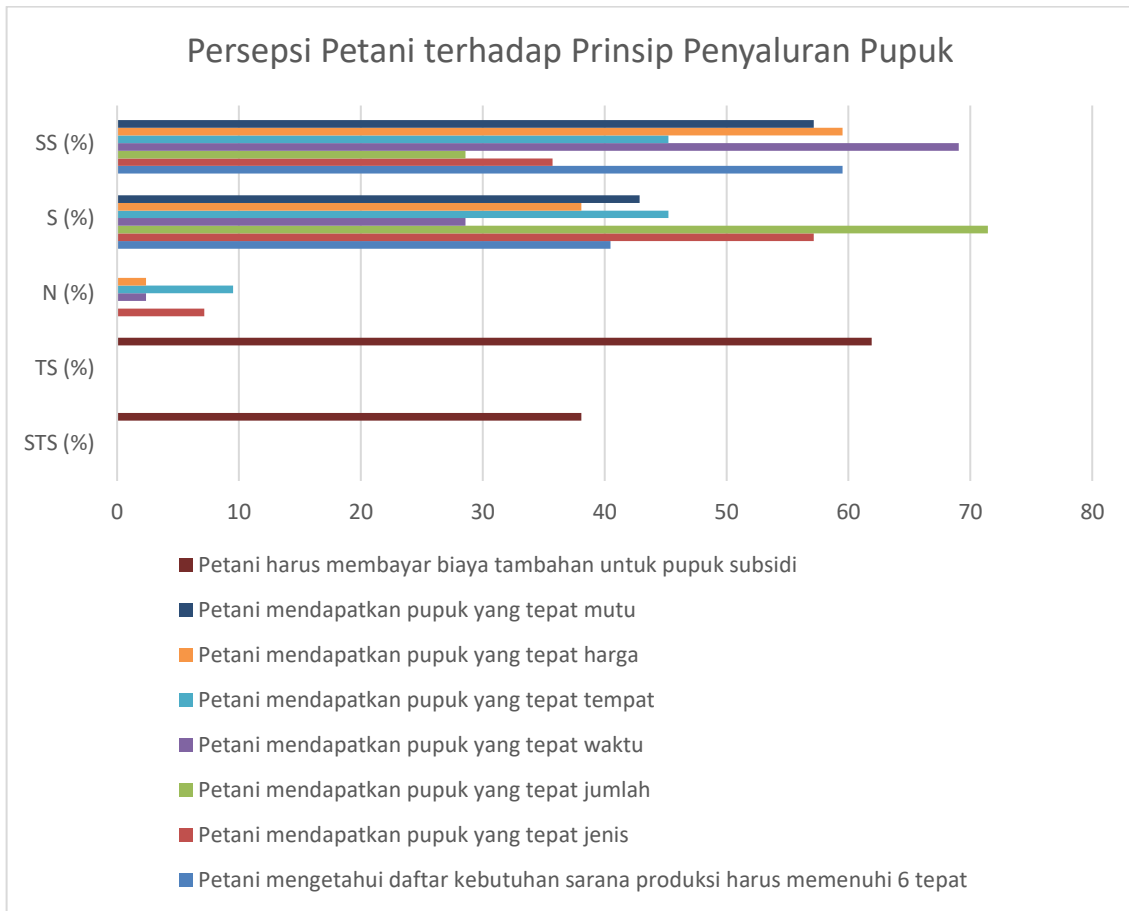
Dalam kegiatan tersebut disosialisasikan aturan main yang harus ditaati oleh setiap anggota kelompok tani.



Penggunaan kartu tani pernah dipakai oleh petani bawang merah pada awal tahun 2021. Pada saat itu pemerintah daerah membagikan kartu tani untuk menggunakannya sebagai alat penugus penebusan kuota pupuk subsidi. Sempat dipergunakan dalam kurun waktu 3 tahun. Namun setelah expired banyak petani yang tidak sanggup untuk menggunakan kartu tani tersebut, dan memilih menggunakan T- puber.

Sedangkan dari indikator prinsip penyaluran pupuk, sebagian besar petani setuju bahwa penyaluran pupuk dilakukan dengan memperhatikan 6 prinsip penyaluran yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat kualitas, tepat harga, tepat tempat, dan tidak membutuhkan biaya tambahan. Namun dari sisi tepat waktu keterangan petani dikoreksi oleh para penyuluh yang menyatakan bahwa penyaluran pupuk sering mengalami keterlambatan.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing



Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

BAB IV

EFISIENSI TEKNIS, EKONOMIS USAHATANI PADI, JAGUNG, BAWANG MERAH PASKA KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK 2022

A. Efisiensi Usahatani Padi Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pupuk 2022

Usahatani padi di Kecamatan Gapura menggunakan beberapa input yaitu lahan, benih, tenaga kerja, insektisida, herbisida, pupuk urea dan pupuk NPK. Deskripsi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi sebelum adanya kebijakan subsidi pupuk pada tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4. Dapat dilihat dalam tabel bahwa rata-rata penggunaan input masih perlu ditingkatkan jumlahnya, kecuali herbisida. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan input oleh petani masih di bawah rekomendasi yang dianjurkan.

Tabel 4. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Sebelum Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.

Keterangan	Koefisien	Standar Error	T Rasio	Signifikansi
Konstanta	9.1684	0.9740	9.4131	
Luas Lahan	0.1830	0.0979	1.8696	***
Benih	0.2825	0.0423	6.6742	*
Tenaga kerja	0.2079	0.0422	4.9290	*
Insektisida	0.0222	0.0123	1.8042	***
Herbisida	0.0339	0.0356	0.9538	
Urea	0.2719	0.0376	7.2407	*
NPK	0.0195	0.0081	2.4204	**
Sumber Inefisiensi				
Konstanta	0.2201	0.8298	0.2653	
Dummi akses ke penyuluh	-0.0133	0.0164	-0.8122	
Pendidikan	-0.3320	0.0614	-5.4111	**
Frekwensi penyuluhan	-0.7880	0.3873	-2.0346	**
persentase kepatuhan penyaluran subsidi	-1.3740	0.3899	-3.5236	*
Sumber pendapatan	-1.0399	0.5899	-1.7628	*
Status Lahan	-0.1851	0.1873	-0.9882	
sigma-squared	0.6274	0.1681	3.7319	*
gamma	0.9999	0.0012	868.9232	*

Sumber : Data Primer, 2023

Keterangan : * (alfa 1%); ** (alfa 5%); *** (alfa 10%)

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi setelah adanya perubahan kebijakan subsidi pupuk 2022, mengalami sedikit perubahan. Faktor yang berpengaruh ada lima yaitu luas lahan, benih, pupuk urea, NPK, dan tenaga kerja. Sedangkan herbisida dan insektisida tidak berpengaruh. Luas lahan berpengaruh positif artinya jika lahan yang dipergunakan untuk berusahatani ditingkatkan sebesar 1%, maka produksi padi akan meningkat sebesar 0.2830%. Hal ini dapat dilakukan oleh petani dengan membentuk kelompok tani dalam hamparan luas lahan yang berdekatan, sehingga mereka dapat melakukan usahatani secara bersama-sama, termasuk dalam pembelian input. Faktor benih juga berpengaruh secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlag benih yang dipergunakan masih kurang. Kebutuhan benih sesuai anjuran sebanyak 25Kg/Hektar, sementara rata-rata penggunaan benih di lokasi penelitian sebesar 18.23 Kg/Hektar.

Tabel 5. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Setelah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022

Keterangan	Koefisien	Standar Error	T Rasio	Signifikansi
Konstanta	10.1684	0.9040	11.2481	
Luas Lahan	0.2830	0.0979	2.8915	*
Benih	0.2025	0.0423	4.7841	*
Tenaga kerja	0.1779	0.0422	4.2178	*
Insektisida	0.0222	0.0723	0.3073	
Herbisida	0.0539	0.0356	1.5160	
Urea	0.2419	0.0276	8.7799	*
NPK	0.0195	0.0041	4.7978	*
Sumber Inefisiensi				
Konstanta	0.2201	0.8298	0.2653	
Dummi akses ke penyuluh	-0.0133	0.0194	-0.6864	
Pendidikan	-0.1243	0.0614	-2.0259	**
Frekwensi penyuluhan	0.3885	0.3873	1.0031	
persentase kepatuhan penyaluran subs	-1.3740	0.3899	-3.5236	*
Sumber pendapatan	-0.3885	0.1873	-2.0742	**
Status Lahan	-0.4851	0.1673	-2.8995	*
sigma-squared	0.6274	0.2681	2.3401	**
gamma	0.9999	0.0512	19.5481	*

Sumber : Data Primer, 2023

Keterangan : * (alfa 1%); ** (alfa 5%); *** (alfa 10%)

Perhitungan nilai efisiensi teknis dan ekonomis pada usahatani padi di Kecamatan Gapura ditunjukkan dalam Tabel 6. Terlihat bahwa setelah adanya kebijakan subsidi pupuk tahun 2022, terjadi penurunan efisiensi teknis maupun

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

ekonomis. Hal ini dapat disebabkan karena petani menerima alokasi pupuk yang jumlahnya lebih sedikit, dan sebagian pupuk harus dibeli tanpa skema subsidi. Selain itu terdapat beberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi efisiensi teknis diantaranya tingkat pendidikan, persentase kepatuhan penyaluran subsidi, sumber pendapatan, dan status lahan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pengurang inefisiensi teknis jika mengalami peningkatan. Persentase kepatuhan terhadap mekanisme pengajuan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Rata-rata persentase kepatuhan di lapang sebesar 85%. Beberapa kasus yang ditemui di lapangan adalah

1. Penyaluran pupuk sering tidak tepat waktu, ketersediaan pupuk tidak ada saat dibutuhkan oleh petani, hal ini karena masa tanam yang dilakukan oleh petani tidak sama dengan periode penganggaran. Petani MT I dimulai bulan Januari namun pemberian subsidi pupuk tidak tersedia karena dengan alasan anggaran belum diputus dan SK dari kementerian belum turun ke Pabrik sehingga tdk berani untuk mendistribusikan. Keterlambatan pemupukan bisa terjadi sampai 2 bulan, hal ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman.
2. Kasus tidak tepat juga terjadi karena ada kebijakan realokasi pupuk dari provinsi sehingga pada akhir tahun 2022 petani yang membutuhkan pupuk tidak tersedia di kios. Alasan yang dikemukakan oleh provinsi adalah pada saat monev pertengahan tahun, jatah pupuk bersubsidi di kabupaten sumenep masih banyak yang belum terserap. Sementara di kabupaten lain di Jawa Timur banyak yang kekurangan. Tidak terserapnya karena pola tanam di kabupaten Sumenep berbeda dengan di Jawa karena kondisi lahan dan sistem pengairan yang tidak intensif, sehingga pada masa kemarau banyak yang tidak melakukan usahatani. Sehingga terkesan serapan sedikit. Tetapi di awal musim hujan kebutuhan pupuk meningkat sangat signifikan. Tetapi karena terlanjur direalokasikan maka banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk sesuai jatahnya
3. Terdapat kasus petani menjual pupuk bersubsidi yang menjadi jatahnya kepada petani di luar kelompok tani atau yang tidak mengikuti kelompok tani, dan ini melanggar peraturan
4. Terdapat kasus petani membeli pupuk namun tidak dipergunakan untuk kegiatan usahatani, dan dipergunakan untuk jaga-jaga di musim tanam yang akan datang supaya ketika dibutuhkan telah tersedia.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 6. Perbandingan Efisiensi Teknis dan Ekonomis pada Produksi Padi di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022

Keterangan	Sebelum		Sesudah	
Kategori Efisiensi Teknis	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Kurang dari 0.8	27	64.29	35	83.33
sama dengan atau lebih dari 0.8 - 1.0	15	35.71	7	16.67
Rata-Rata Efisiensi Teknis	0.6199		0.4385	
Kategori Efisiensi Ekonomis				
Kurang dari 0.8	30	71.43	40	95.24
sama dengan atau lebih dari 0.8 - 1.0	12	28.57	2	4.76
Rata-Rata Efisiensi Ekonomis	0.4125		0.3278	

B. Efisiensi Usahatani Jagung Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pupuk 2022

Usahatani jagung di Kecamatan Manding menggunakan beberapa input yaitu lahan, benih, tenaga kerja, insektisida, pupuk urea dan pupuk kandang. Diskripsi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi sebelum adanya kebijakan subsidi pupuk pada tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 7. Dapat dilihat dalam tabel bahwa rata-rata penggunaan input masih perlu ditingkatkan jumlahnya, kecuali tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan input oleh petani masih di bawah rekomendasi yang dianjurkan.

Kebutuhan benih jagung perhektar sesuai anjuran sekitar 20-25 Kilogram perHektar, namun rata-rata petani hanya menggunakan sebanyak 17.5 Kg/Hektar. Sedangkan kebutuhan pupuk urea per hektar sebanyak 200 Kilogram. Dalam kenyataannya petani rata-rata hanya mengaplikasikan pupuk urea sebanyak 125.4 Kilogram perhektar. Jumlah ini masih kurang dari rekomendasi. Keterbatasan modal menjadi sebab rendahnya penggunaan pupuk urea di wilayah penelitian. Hal yang sama juga terjadi pada input insektisida.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 7. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Sebelum Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022.

Keterangan	Koefisien	Standar Error	T Rasio	Signifikansi
Konstanta	0.409	2.220	0.184	
Luas lahan	0.173	0.044	3.948	*
Benih	0.134	0.019	7.014	*
Urea	0.404	0.047	8.669	*
Insektisida	0.176	0.037	4.756	*
Pupuk kandang	0.135	0.065	2.069	**
Tenaga Kerja	0.024	0.024	1.007	
Sumber Inefisiensi				
Konstanta	3.316	0.935	3.547	
Frekwensi penyuluhan	-0.739	0.308	-2.401	**
Persentase kepatuhan penyaluran subsidi	-0.016	0.014	-1.152	
Sumber pendapatan	0.000	0.014	-0.005	
Status Lahan	-0.038	0.021	-1.762	***
Sigma-square	0.157	0.029	5.461	
Gamma	0.999	0.140	2.940	

Sumber : Data Primer, 2023

Keterangan : * (alfa 1%); ** (alfa 5%); *** (alfa 10%)

Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi jagung setelah adanya perubahan kebijakan subsidi pupuk 2022, mengalami sedikit perubahan. Semua input penggunaannya masih dibawah rekomendasi, kecuali tenaga kerja (Tabel 8).

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 8. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Setelah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022

Keterangan	Koefisien	Standar Error	T Rasio	Signifikansi
Konstanta	0.409	2.220	0.184	
Luas lahan	0.173	0.074	2.342	**
Benih	0.314	0.119	2.635	**
Urea	0.224	0.066	3.390	*
Insektisida	0.176	0.077	2.286	**
Pupuk kandang	0.135	0.058	2.317	**
Tenaga Kerja	0.004	0.024	0.157	
Sumber Inefisiensi				
Konstanta	3.316	0.935	3.547	
Frekwensi penyuluhan	-0.739	0.308	-2.401	**
Persentase kepatuhan penyaluran subsidi	-0.016	0.014	-1.152	
Sumber pendapatan	0.002	0.014	0.119	
Status Lahan	-0.038	0.021	-1.762	***
Sigma-square	0.157	0.029	5.428	
Gamma	0.999	0.240	4.159	

Sumber : Data Primer, 2023

Keterangan : * (alfa 1%); ** (alfa 5%); *** (alfa 10%)

Perhitungan nilai efisiensi teknis dan ekonomis pada usahatani jagung di Kecamatan Manding ditunjukkan dalam Tabel 12. Terlihat bahwa setelah adanya kebijakan subsidi pupuk tahun 2022, terjadi penurunan efisiensi teknis maupun ekonomis. Petani jagung mampu mencapai efisiensi teknis sebelum adanya perubahan kebijakan subsidi pupuk, dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0.8623. Namun kondisi ini mengalami penurunan sejak diberlakukannya kebijakan subsidi pupuk terbaru. Pengurangan penggunaan pupuk urea disyalir sebagai penyebab kasus ini. Selain itu dari sisi efisiensi ekonomis, baik sebelum maupun sesudah terjadi perubahan kebijakan subsidi pupuk, petani masih dalam kategori inefisien secara ekonomis. Beberapa faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab inefisiensi teknis adalah : frekwensi penyuluhan dan status lahan. Penyelenggaraan penyuluhan biasanya berlangsung sebanyak 3 kali dalam 1 musim tanam, namun rata-rata petani hanya datang 1 kali. Sedangkan dari sisi status lahan, petani dengan status lahan sewa lebih efisien dibandingkan dengan petani yang status lahan milik sendiri.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 9. Perbandingan Efisiensi Teknis dan Ekonomis pada Produksi Jagung di Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022

Keterangan	Sebelum		Sesudah	
Kategori Efisiensi Teknis	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Kurang dari 0.8	7	16.67	25	59.52
sama dengan atau lebih dari 0.8 - 1.0	35	83.33	17	40.48
Rata-Rata Efisiensi Teknis	0.8623		0.7459	
Kategori Efisiensi Ekonomis	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Kurang dari 0.8	30	71.43	37	88.10
sama dengan atau lebih dari 0.8 - 1.0	12	28.57	5	11.90
Rata-Rata Efisiensi Ekonomis	0.4487		0.2523	

Sumber : Data Primer, 2023

C. Efisiensi Usahatani Bawang Merah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pupuk 2022

Usahatani Bawang Merah di Kecamatan Rubaru menggunakan beberapa input yaitu lahan, benih, tenaga kerja, insektisida, fungisida, herbisida, pupuk NPK, pupuk organik, serta pupuk TSP. Deskripsi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi sebelum adanya kebijakan subsidi pupuk pada tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 10. Dapat dilihat dalam tabel bahwa rata-rata penggunaan input masih perlu ditingkatkan jumlahnya, kecuali pupuk organik dan insektisida. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan input oleh petani masih di bawah rekomendasi yang dianjurkan.

Variabel benih berpengaruh positif terhadap produksi bawang merah. Jika benih ditambah sebesar 1% maka produksi bawang merah meningkat sebesar 0.1227%. Penggunaan benih anjurak sebanyak 1.4 ton per hektar. Sedangkan di daerah rubaru rata-rata jumlah benih yang dipergunakan perhektar sebesar 742.37 Kilogram perhektar. Jumlah ini masih jauh dibawah rekomendasi. Sedangkan peningkatan pupuk NPK sebesar 1% dapat meningkatkan mendorong peningkatan produksi sebanyak 0.0326%. Rekomendasi penggunaan pupuk ini adalah 650 Kg perhektar. Sementara rata-rata penggunaan dilokasi sebesar 224.63 KgHektar.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 10. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Sebelum Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022

Keterangan	Koefisien	Standar Error	T Rasio	Signifikansi
Konstanta	0.3300	0.0956	3.451	
Luas Lahan	0.1682	0.0655	2.569	**
Benih	0.1227	0.0118	10.371	*
NPK	0.0326	0.0036	9.097	*
Pupuk Organik	0.0040	0.0073	0.550	
Pupuk TSP	0.0117	0.0033	3.519	*
Insektisida	0.0216	0.0245	0.883	
Herbisida	0.2088	0.0749	2.787	**
Fungisida	0.0114	0.0023	4.876	*
Tenaga Kerja	0.4199	0.1556	2.699	**
Sumber Inefisiensi				
Konstanta	-0.3165	0.2609	-1.213	
Frekwensi penyuluhan	0.0510	0.0257	1.985	***
Persentase kepatuhan penyaluran subsidi	-0.1038	0.0192	-5.411	*
Sumber pendapatan	-0.0241	0.0169	-1.425	
Status Lahan	0.0119	0.0044	2.682	**
Sigma-squared	0.0052	0.0010	5.3187	
Gamma	0.9999	0.0047	211.6777	

Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi setelah adanya perubahan kebijakan subsidi pupuk 2022, mengalami sedikit perubahan. Semua input penggunaannya masih dibawah rekomendasi, kecuali tenaga kerja (Tabel 10). Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua input kecuali insektisida tidak berpengaruh nyata. Gangguan terbesar yang terdapat dalam usahatani bawang merah adalah gangguan dari rumput liar dan jamur. Sementara gangguan dari insekta tidak terlalu berpengaruh pada produksi bawang merah.

Penggunaan pupuk organik menjadi hal yang penting dalam usahatani bawang merah. Jumlah pupuk terbesar yang digunakan oleh petani adalah pupuk organik, mencapai 1.745,44 kg perhektar. Hal ini dilakukan oleh petani dengan harapan pemberian pupuk ini, mampu menjaga kesuburan tanah yang sudah dalam keadaan kelebihan pupuk anorganik atau kimia. Selain itu tanaman yang menggunakan pupuk organik akan memiliki kualitas yang bagus, tanaman tidak mudah diserang oleh penyakit, dan hasil produksi bawang yang diperoleh lebih menyehatkan bagi manusia karena kandungan nutrisinya lebih lengkap (Hendriyana, 2022).

Pestisida yang dipakai pada usahatani Bawang Merah Varietas Rubaru adalah insektisida dengan merek Preza dan Demolish. Sedangkan untuk merek herbisida yang sering digunakan petani yaitu Trail dan Goal. Kedua merek tersebut sama-sama berfungsi untuk mengendalikan gulma pada tanaman bawang merah (Anonymous,

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

2023). Merek fungisida yang sering digunakan oleh petani di daerah penelitian yaitu Remazole, Oktave, Amistar, dan Dithane. Merek remazole dan oktave digunakan petani di Desa Mandala untuk mengendalikan penyakit layu *fusarium sp* atau moler pada daun bawang merah. Petani menggunakan fungisida merek deconil dan dithane untuk penyakit bercak ungu yang ada didaun bawang merah. Kebanyakan petani di Desa Mandala masih belum menerapkan anjuran pemberian pestisida yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Praktik Hortikultura yang Baik. Pada pasal 32 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pemberian pestisida untuk budidaya harus sesuai anjuran rekomendasi (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Namun di Desa Mandala para petani bawang merah tidak mengikuti aturan pemberian pestisida dimana petani lebih memilih memberikan pestisida sesuai dengan kepercayaan turun temurun. Sebagai upaya pengendalian hama dan penyakit yang menyerang bawang merah, terdapat cara dalam menggunakan pestisida yang baik dan benar agar organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tidak resisten terhadap pestisida yaitu : (1) tepat jenis dan mutu; (2) pestisida yang digunakan telah terdaftar atau sudah berizin; (3) selektif, efektif terhadap jasad renik, mudah untuk terurai, dan memiliki daya racun yang rendah; (4) tidak kadaluarsa; (5) memperhatikan label dimana bentuk wadah masih baik dan merupakan produk asli; (6) pemberian pestisida dilakukan tepat waktu ketika hama ada pada stadium rentan; (7) pestisida kontak tidak cocok digunakan untuk hama yang ada didalam jaringan tanaman (Soleh, 2020).

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 11. Faktor yang Berpengaruh pada Produksi Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Setelah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022

Keterangan	Koefisien	Standar Error	T Rasio	Signifikansi
Konstanta	0.3300	0.0956	3.451	
Luas Lahan	0.1682	0.0655	2.569	**
Benih	0.0227	0.0108	2.095	***
NPK	0.1259	0.0258	4.875	*
Pupuk Organik	0.1040	0.0073	14.191	*
Pupuk TSP	0.0172	0.0033	5.152	*
Insektisida	0.0164	0.0245	0.669	
Herbisida	0.3188	0.0749	4.255	*
Fungisida	0.0114	0.0023	4.876	*
Tenaga Kerja	0.2199	0.1056	2.083	**
Sumber Inefisiensi				
Konstanta	-0.3165	0.0609	-5.198	
Frekwensi penyuluhan	0.0510	0.0257	1.985	***
Persentase kepatuhan penyaluran subsidi	-0.1038	0.0192	-5.411	*
Sumber pendapatan	-0.0241	0.0169	-1.425	
Status Lahan	0.0119	0.0044	2.682	**
Sigma-squared	0.9517	0.0972	9.7934	
Gamma	0.9999	0.0572	17.4695	

Perhitungan nilai efisiensi teknis dan ekonomis pada usahatani bawang merah di Kecamatan Rubaru ditunjukkan dalam Tabel 12. Terlihat bahwa setelah adanya kebijakan subsidi pupuk tahun 2022, terjadi penurunan efisiensi teknis maupun ekonomis. Petani bawang merah mampu mencapai efisiensi teknis sebelum adanya perubahan kebijakan subsidi pupuk, dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0.8057. Namun kondisi ini mengalami penurunan sejak diberlakukannya kebijakan subsidi pupuk terbaru. Pengurangan penggunaan pupuk NPK disinyalir sebagai penyebab kasus ini. Selain itu dari sisi efisiensi ekonomis, baik sebelum maupun sesudah terjadi perubahan kebijakan subsidi pupuk, petani masih dalam kategori inefisien secara ekonomis. Beberapa faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab inefisiensi teknis adalah : frekwensi penyuluhan. Persentase kepatuhan pada sistem penyaluran pupuk subsidi, dan status lahan. Penyelenggaraan penyuluhan biasanya berlangsung sebanyak 3-4 kali dalam 1 musim tanam, namun rata-rata petani hanya datang 1-2 kali. Sedangkan dari sisi status lahan, petani dengan status lahan sewa lebih efisien dibandingkan dengan petani yang status lahan milik sendiri.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 12. Perbandingan Efisiensi Teknis dan Ekonomis pada Produksi Bawang Merah di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Adanya Perubahan Kebijakan Subsidi Pupuk 2022

Keterangan	Sebelum		Sesudah	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Kategori Efisiensi Teknis				
Kurang dari 0.8	21	50.00	29	69.05
sama dengan atau lebih dari 0.8 - 1.0	21	50.00	14	33.33
Rata-Rata Efisiensi Teknis	0.8057		0.7251	
Kategori Efisiensi Ekonomis				
Kurang dari 0.8	26	61.90	38	90.48
sama dengan atau lebih dari 0.8 - 1.0	16	38.10	4	9.52
Rata-Rata Efisiensi Ekonomis	0.4958		0.2849	

Perhitungan nilai efisiensi teknis dan ekonomis pada usahatani bawang merah di Kecamatan Rubaru ditunjukkan dalam Tabel 15. Terlihat bahwa setelah adanya kebijakan subsidi pupuk tahun 2022, terjadi penurunan efisiensi teknis maupun ekonomis. Petani bawang merah mampu mencapai efisiensi teknis sebelum adanya perubahan kebijakan subsidi pupuk, dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0.8057. Namun kondisi ini mengalami penurunan sejak diberlakukannya kebijakan subsidi pupuk terbaru. Pengurangan penggunaan pupuk NPK disinyalir sebagai penyebab kasus ini. Selain itu dari sisi efisiensi ekonomis, baik sebelum maupun sesudah terjadi perubahan kebijakan subsidi pupuk, petani masih dalam kategori inefisien secara ekonomis. Beberapa faktor sosial ekonomi yang menjadi penyebab inefisiensi teknis adalah : frekwensi penyuluhan, kepatuhan terhadap mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dan status lahan. Penyelenggaraan penyuluhan biasanya berlangsung sebanyak 3 kali dalam 1 musim tanam, namun rata-rata petani hanya datang 1 kali. Sedangkan dari sisi status lahan, petani dengan status lahan sewa lebih efisien dibandingkan dengan petani yang status lahan milik sendiri.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

BAB V

**DAYA SAING USAHATANI PADI, JAGUNG, BAWANG MERAH
PASKA KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK**

A. Daya Saing Usahatani Padi, Jagung, Bawang Merah Paska Kebijakan Subsidi

Daya saing usahatani komoditas diukur dengan menggunakan dua pendekatan yakni tingkat keuntungan dan tingkat efisiensi usahatani (Haryanto et al., 2019). Untuk mengetahui daya saing komoditas jagung tidak hanya dinilai dari segi tingkat produksi, produktivitas, volume, bahkan nilai ekspor-impor secara parsial namun juga secara komprehensif dari aspek finansial dan aspek ekonomi. Daya saing usahatani jagung merupakan kemampuan pelaku pengembangan komoditas yang menghasilkan output dengan kualitas dapat bersaing di pasar domestik bahkan di pasar internasional, sekaligus menghasilkan peningkatan pendapatan secara konstan dengan mengalokasikan biaya sumberdaya.

Peningkatan daya saing usahatani merupakan agenda penting dalam rangka pembangunan pertanian dalam menghadapi perdagangan bebas sekaligus pemenuhan pangan nasional yang berkualitas (R. A. Pratama, Kusrimi, et al., 2022). Daya saing suatu komoditas dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dan efisiensi usahatani (Wanto, 2017). Perlunya pemahaman konsep dan pengukuran kinerja daya saing baik dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam mengetahui daya saing usahatani jagung.

Konsep daya saing terdiri dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan pengukur daya saing potensial yaitu membandingkan keuntungan pengembangan yang akan dicapai jika perekonomian tidak pernah mengalami distorsi dan perubahan dari kebijakan pemerintah. Keunggulan kompetitif merupakan pengukur daya saing efisiensi produksi usahatani yang akan dicapai jika kondisi perekonomian aktual. Secara mekanis komoditas yang memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi secara ekonomi sama halnya keunggulan kompetitif juga memiliki secara finansial (Lestari et al., 2020).

Pada peningkatan daya saing tidak lepas dengan adanya tantangan seperti maraknya produk impor dalam negeri sebagai alternatif penghematan biaya dalam produksi jagung. Menurut Haryanto *et al.*, (2019) dalam menghadapi tantangan dibutuhkan keunggulan kompetitif yang mengacu pada efisiensi produksi usahatani di tingkat internasional, serta keunggulan komparatif mengacu pada perbandingan keuntungan pelaku usahatani. Komoditas jagung merupakan komoditas potensial dan berdaya saing tinggi apabila dibandingkan jagung impor (Rahmaniyah & Rum, 2020).

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Analisis PAM digunakan untuk menganalisis kegiatan ekonomi dengan menghitung tingkat keuntungan privat, tingkat keuntungan sosial, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usahatani. Keuntungan privat merupakan nilai untuk mengetahui keunggulan kompetitif dengan menggunakan harga pasar atau harga aktual (Zuhri et al., 2020). Sekaligus menjadi indikator daya saing didasarkan sistem komoditas teknologi, nilai output, biaya input, dan transfer kebijaksanaan. Keuntungan sosial merupakan nilai untuk mengetahui keunggulan komparatif dengan menggunakan harga sosial (bayangan) serta dari sistem komoditas berada kondisi tidak terdapat divergensi harga akibat kebijaksanaan.

Metode analisis untuk menjawab tujuan kedua dipergunakan metode *Policy Analyze Matric* (PAM) (Suryana & Agustian, 2016), (Anwar, 2004). Kelebihan model ini adalah didapatkan indikator keunggulan komparatif melalui DRCR (*Domestic Resource Cost Ratio*) dan dihasilkan indikator keunggulan kompetitif melalui PCR, NPCO, NPCI, EPC, PC, dan SRP. Untuk dapat menghitung semua indikator dibutuhkan informasi tentang harga input, output dan keuntungan dalam bentuk harga pasar dan harga sosial. Tabel 13 dan Tabel 14 adalah rumus untuk menghitung keunggulan komparatif dan kompetitif.

Tabel 13. Formulasi PAM pada Usahatani Jagung, Padi, dan Kedelai

Uraian	Penerimaan	Biaya Input Tradable	Biaya Faktor Domestik	Keuntungan
Nilai Finansial (Harga Privat)	A	B	C	D
Nilai Ekonomi (Harga Sosial)	E	F	G	H
Divergensi	I	J	K	L

Keterangan :

- A : Penerimaan pada harga privat
- B : Biaya input tradable pada harga privat
- C : Biaya input domestik pada harga privat
- D : Keuntungan pada harga privat (A-B-C)
- E : Penerimaan pada harga sosial
- F : Biaya input tradable pada harga sosial
- G : Biaya input domestik pada harga sosial
- H : Keuntungan pada harga (E-F-G)
- I : Penerimaan akibat dampak kebijakan dan distorsi pasar (A-E)
- J : Perbedaan biaya input tradable akibat kebijakan dan distorsi pasar (B-F)
- K : Perbedaan biaya input domestik akibat kebijakan dan distorsi pasar (C-G)
- L : Perbedaan keuntungan akibat kebijakan dan distorsi pasar (D-H)

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Adapun pengukuran koefisien keputusan penentu keunggulan kompetitif dan komparatif dapat dilihat dalam Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Koefisien, dan Formula Pengukuran Keunggulan Kompetitif dan Komparatif

Koefisien	Formula	Keterangan
Nominal Protection Coefficient Output (NPCO)	A/E	NPCO > 1 menunjukkan adanya proteksi terhadap output. NPCO < 1 merupakan indikator dari adanya pajak yang dikenakan atas output
Nominal Protection Coefficient Input (NPCI)	B/F	NPCI > 1 merupakan indikasi dari adanya pajak yang dikenakan terhadap input tradables NPCI < 1 merupakan indikasi dari adanya subsidi.
Private Cost Ratio (PCR)	$C/(A-B)$	PCR > 1, usahatani tidak memiliki daya saing kompetitif
Domestic Resource Cost Ratio (DRCR)	$G/(E-F)$	DRCR > 1, usahatani memiliki daya saing komparatif
Effective Protection Coefficient (EPC)	$(A-B)/(E-F)$	EPC > 1 keuntungan privat lebih besar dari tanpa kebijakan, yang berarti kebijakan yang diterapkan memberikan insentif untuk berproduksi. EPC < 1 kebijakan pemerintah menghambat upaya peningkatan produksi.
Profitability Coefficient (PC)	D/H	
Subsidy Ratio to Producers (SRP)	L/E	

Rasio biaya privat (*Private Cost Ratio*) menjadi indikator dalam menunjukkan kemampuan sistem usahatani dalam membayar biaya domestik dan tetap kompetitif (Sukmaya, Rachmina, Magister, et al., 2016). Biaya sumberdaya domestik (*Domestic Resource Cost Ratio*) menjadi indikator dalam mengetahui keunggulan komparatif dengan mengalokasikan jumlah sumber daya domestik secara hemat untuk memperoleh satu unit devisa. Nilai PCR < 1 artinya kegiatan usahatani suatu komoditas memiliki keunggulan kompetitif. Nilai DRCR < 1 artinya kegiatan usahatani suatu

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

komoditas memiliki keunggulan komparatif.

Metode analisis PAM juga dapat mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usahatani. Indikator dampak kebijakan pemerintah terbagi menjadi tiga yakni kebijakan input, kebijakan output, kebijakan input-output (Wanto, 2017). Kebijakan input biasa disebut NPCI (*Nominal Protection Coefficient on Input*) merupakan rasio biaya input *tradable* pada harga privat dengan biaya input *tradable* pada harga sosial. Nilai $NPCI < 1$ menunjukkan jika harga input *tradable* pada harga privat lebih rendah dibandingkan dengan harga sosial dengan kata lain pemerintah memberikan subsidi dalam input *tradable*, jika $NPCI > 1$ mengindikasikan jika pemerintah tidak memberikan subsidi terhadap input *tradable* (Mantau, 2016).

Kebijakan output biasa dikenal NPCO (*Nominal Protection Coefficient on Output*) merupakan rasio antara penerimaan pada harga privat dengan penerimaan harga sosial. Nilai $NPCO > 1$ menunjukkan bahwa kebijakan output bersifat protektif terhadap output, jika $NPCO < 1$ mengindikasikan kebijakan output bersifat disinsentif atau produsen memberikan transfer kepada pemerintah.

Analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap input-output dalam kegiatan usahatani biasanya disebut EPC (*Effective Protection Coefficient*) yang merupakan perbandingan antara nilai tambah di tingkat harga privat dengan nilai tambah di tingkat harga sosial. Selain itu melalui nilai EPC akan diketahui bagaimana pemerintah mengatur kebijakan pada input dan output yang bersifat menghambat atau memproteksi produksi. Nilai $EPC > 1$ mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dianggap telah efektif dalam memproteksi seluruh kegiatan usahatani, jika nilai $EPC < 1$ menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu memproteksi kegiatan usahatani secara keseluruhan (R. A. Pratama, Kusrimi, et al., 2022).

Penelitian mengenai daya saing dengan alat analisis PAM sudah banyak dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Zuhri *et al.*, (2020), Lestari *et al.*, (2022), Radiansah *et al.*, (2016), Winta Noi *et al.*, (2023), Zulfa & Hariyani, (2022), Pratama *et al.*, (2022), Puspita Devi *et al.*, (2020), Mantau, (2016), Wanto, (2017), Rahmadiyah & Rum, (2020), dan Futon & Ahmad, (2019). Penelitian sejenis mengenai daya saing usahatani jagung di Indonesia juga pernah dilakukan oleh Lestari *et al.*, (2020) yang membahas tentang penggunaan sarana produksi, asumsi ekonomi makro, dan daya saing. Kegiatan usahatani jagung yang dilakukan oleh petani masih belum sesuai anjuran penyuluh. Pertimbangan tingkat suku bunga hanya berlaku untuk musim tanam 1 (MT 1) yang diberlakukan di Bank BRI. Usahatani jagung di lokasi penelitian dikatakan menguntungkan dan layak diusahakan secara finansial dan ekonomi. Selain itu usahatani jagung juga memiliki daya saing mulai dari keunggulan kompetitif sampai keunggulan komparatif.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

B. Daya Saing Jagung Sesudah Kebijakan Pupuk 2022

Analisis daya saing dengan menggunakan PAM dapat dilakukan dengan mengidentifikasi penggunaan input maupun output, baik yang bersifat *tradable* maupun input *non tradable* pada usahatani Jagung Lokal Varietas Manding. Input yang digunakan dalam kegiatan usahatani jagung lokal manding meliputi benih jagung, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk kandang, pestisida (insektisida dan herbisida), sewa lahan, tenaga kerja, dan peralatan pertanian seperti yang terlihat pada Tabel 15.

Mayoritas petani jagung menggunakan benih jagung lokal. Pemilihan penggunaan Benih Jagung Varietas Manding karena sasaran pasar yang jelas serta output yang dihasilkan diserap oleh pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian Wati et al., (2022) Jagung Varietas Manding, memiliki rasa gurih serta biji jagung lebih banyak karena ukurannya yang kecil. Selain itu harga jual jagung lokal lebih tinggi dibandingkan jagung hibrida (Prasetyo & Fauziah, 2020). Oleh karena itu, petani masih memilih membudidayakan Jagung Lokal Varietas Manding.

Penggunaan dosis pupuk terbesar adalah pupuk kandang dan pupuk urea, hal ini disebabkan para petani berharap penggunaan pupuk urea dengan dosis yang lebih tinggi daripada NPK agar tanaman jagung mereka mendapatkan nutrisi dalam pertumbuhan vegetatifnya. Sedangkan pemakaian pupuk kandang dapat memperbaiki kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi tanah dengan jarak tanam yang telah diatur oleh petani untuk meningkatkan produksi jagung lokalnya (Sholihah & Saputro, 2016). Disamping itu penggunaan pupuk NPK juga sangat berperan penting dalam masa pertumbuhan jagung lokal dimana dapat meningkatkan berat berangkasan dan biji jagung (Zuhri et al., 2020), sehingga akan meningkatkan volume hasil produksi jagung.

Tabel 15. Penggunaan Input Usahatani Jagung di Kecamatan Manding Pada Harga Privat

Input	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Benih	Kg/Ha	17.31	11,000	190,410
Urea	Kg/Ha	261.66	2,250	588,735
NPK	Kg/Ha	242.41	2,300	557,543
Pupuk Kandang	Kg/Ha	1150.19	500	575,095
Insektisida +Herbisida	MI/Ha	943.85	691.67	652,830
TK	HOK/ha	11.2	70,000	784,000
Sewa Lahan			933,333	933,333
Penyusutan alat				24,533

Sumber: (Data Primer, 2023) Data Diolah

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Jenis pestisida yang digunakan adalah insektisida dan herbisida. Merek insektisida yang sering digunakan adalah Buldok, Sidatan, Curacron, dan Alika. Insektisida ini digunakan karena petani memiliki kendala dan risiko, mendapatkan serangan hama ulat grayak. Merek herbisida yang digunakan oleh kalangan petani jagung lokal adalah Tabas dan Gandewa. Herbisida ini digunakan untuk mengatasi penyakit bulai dan gulma pada tanaman jagung.

Tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja upah atau diluar keluarga petani dengan upah yang dibayarkan sejumlah Rp. 70.000,00 per 8 jam kerja sebagai upah harian. Mayoritas petani di Kecamatan Manding dalam kegiatan usahatani jagung biasanya dilakukan di lahan milik mereka pribadi, atau secara bagi hasil maupun sewa. Mekanisme bagi hasil yang berlaku di petani adalah 70% hasil produksi milik penggarap atau petani sedangkan sisanya 30% dimiliki oleh pemilik lahan. Sedangkan sewa akan dibayarkan oleh petani sebesar Rp.2.800.000 dalam kurun waktu satu tahun dengan tiga kali musim tanam. Peralatan yang digunakan petani dalam membantu kegiatan usaha taninya terdiri dari cangkul, sabit, dan *hand sprayer* namun terdapat beberapa peralatan yang disewa oleh petani ketika kegiatan pengolahan lahan sampai dengan pemanenan yaitu *hand traktor*, *corn sheller*, dan pompa air atau bor. Metode perhitungan yang digunakan untuk mengetahui nilai penyusutan peralatan yang digunakan oleh petani adalah dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Harga output Jagung Lokal Varietas Manding yang berlaku di pasaran sebesar Rp. 11.000,00 per Kg dengan kondisi jagung pipilan, yang dipipil dengan menggunakan bantuan mesin *Corn sheller*. Hasil output Jagung Lokal Varietas Manding diserap oleh produsen pakan ternak, pelaku UMKM, serta masyarakat untuk dijadikan sebagai campuran beras. Sehingga banyaknya serapan pasar untuk Jagung Lokal Varietas Manding menjadikan harga jualnya yang tinggi. Hal ini sependapat dengan penelitian Widyasmita & Suprpti, (2020) yang menjelaskan manfaat jagung lokal yang dapat menambah pendapatan karena mayoritas petani akan menjual 90 persen, hasil usaha taninya. Hal ini karena mereka menyadari harga jual yang tinggi jika dibandingkan dengan jagung hibrida. Selain identifikasi dan analisis terhadap input yang dipergunakan dalam usahatani jagung, maka untuk menggunakan analisis PAM juga dibutuhkan perhitungan terhadap nilai tukar bayangan.

Nilai tukar bayangan (SER) adalah bagian penting dalam menentukan harga sosial atau harga bayangan komoditas yang diperdagangkan dengan harga batas (*border price*). Harga batas (*border price*) terbagi menjadi dua, komoditas yang diekspor menggunakan harga FOB (*free on board*) dan untuk komoditas yang diimpor menggunakan harga CIF (*cost insurance freight*) (Arfah et al., 2017). Penentuan SER dihitung dengan membagi nilai tukar resmi tahun ke-t dengan faktor

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

konversi standar tahun ke-t (R. A. Pratama, Kusrimi, et al., 2022). Berdasarkan hasil perhitungan seperti tersaji dalam Tabel 16, dengan nilai SER tahun 2023 adalah Rp.16.419,65.

Tabel 16. Perhitungan SER

OER	Nilai tukar Resmi	Rp. 15,669	
Tmt	Penerimaan pajak impor	Rp.135,430,000,000,000	
Txt	Penerimaan pajak ekspor	Rp.9,012,700,000,000	
Mt	Total nilai impor	\$ 18,880,000,000	Rp.295,830,720,000,000
Xt	Total nilai ekspor	\$ 149,530,000,000	Rp.2,342,985,570,000,000
Xt+Mt	Rp.2,638,816,290,000,000		
Xt-Txt	Rp.2,333,972,870,000,000		
Mt+Tmt	Rp.431,260,720,000,000		
(Xt-Txt)+(Mt+Tmt)	Rp.2,765,233,590,000,000		
(Xt+Mt)/(Xt-Txt)+(Mt+Tmt)	0.95		
SER= OER/SCFT	Rp. 16,419.65		

Sumber: (BPS, 2022); (BPS, 2023)

Penentuan harga sosial input usahatani untuk input yang bersifat *tradable* menggunakan pendekatan nilai tukar bayangan (SER), sedangkan penentuan harga sosial untuk input yang bersifat *non tradable* menggunakan harga privat. Input *tradable* terdiri dari pupuk urea, pupuk NPK, dan pestisida seperti yang dilampirkan pada Tabel 17. Pendekatan harga sosial pupuk urea dan pupuk NPK menggunakan pendekatan CIF yang dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar bayangan (Lestari et al., 2020). Kedua jenis pupuk tersebut menggunakan pendekatan CIF karena bahan baku pupuk kimia yang mengimpor dari negara lain serta pupuk termasuk input yang dapat diperjualbelikan secara internasional. Sependapat dengan penelitian Pratama et al., (2022) dalam penentuan harga pupuk menggunakan harga yang berlaku di pasar internasional. Selanjutnya nilai CIF kedua pupuk tersebut

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

ditambahkan dengan biaya transportasi dan biaya *handling*. Sama halnya dengan pupuk, pada pestisida juga menggunakan pendekatan CIF yang diketahui jika dikonversikan ke dalam rupiah.

Tabel 17. Penggunaan Input Pada Harga Sosial

Input	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Benih	Kg/Ha	17.31	11,000	190,410
Urea	Kg/Ha	261.66	5,146	1,346,628
NPK	Kg/Ha	242.41	10,049	2,436,169
Pestisida	ml/Ha	943.85	1,616	1,525,516
Pupuk Kandang	Kg/Ha	1150.19	500	575,095
Tenaga Kerja	HOK/Ha	11.2	70,000	784,000
Sewa Lahan			933,333	933,333
Penyusutan alat				18,848

Sumber: (BPS, 2020), (BPS, 2023) Data Diolah

Input peralatan yang digunakan dalam kegiatan usahatani jagung terdapat beberapa alat yang tidak diproduksi oleh Indonesia, dengan kata lain Indonesia membeli atau mengimpor mesin alat pertanian dalam membantu kegiatan usahatani para petani. Sehingga harga yang digunakan dalam menghitung harga sosial adalah sebagian alat yang dimiliki oleh petani (manual) menggunakan harga privat, sedangkan alat modern menggunakan pendekatan CIF. Harga sosial output jagung diperoleh dengan pendekatan CIF yang dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar bayangan (SER). Komoditas jagung dapat diekspor maupun diimpor ke negara-negara lain karena bahan pokok substitusi pengganti beras serta tidak hanya dijadikan sebagai bahan pangan pokok namun juga bisa sebagai bahan makanan camilan.

Meskipun demikian terdapat input yang tidak termasuk ke dalam input tradable seperti benih dimana yang digunakan dalam kegiatan usahatani adalah benih lokal bukan benih hibrida, pupuk kandang termasuk ke dalam input non tradable atau domestik karena bahan baku pembuatan pupuk tersebut tidak membutuhkan bahan kimia atau bahan lainnya serta produksinya yang terbatas hanya cukup untuk para petani yang memiliki ternak sapi. Input lainnya adalah tenaga kerja dan sewa lahan dimana kedua input tersebut tidak termasuk ke dalam input tradable karena tidak dapat diperjualbelikan secara internasional. Hasil perhitungan PAM diperoleh setelah nilai-nilai pada harga privat dan harga sosial telah didapat maka nilai divergensi dapat dihitung.

Selanjutnya untuk menemukan divergensi yang terjadi pada kegiatan usahatani jagung dengan matriks PAM yang dinyatakan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk dapat melakukan analisis daya saing serta dampak kebijakan pemerintah. Berikut hasil

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

perhitungan PAM dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel tersebut menjelaskan kegiatan usahatani yang dilakukan memberikan keuntungan yang positif, artinya keuntungan privat atau *Private Profitability* (PP) dari usahatani yang dijalankan dengan adanya campur tangan pemerintah mampu memberikan hasil yang positif terhadap kegiatan usahatani Jagung Lokal Varietas Manding. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Arfah et al., (2017). Dia menyatakan bahwa pemerintah memberikan insentif positif terhadap keuntungan usahatani suatu komoditas.

Tabel 18. Analisis PAM Usahatani Jagung

	Penerimaan (Rp)	Biaya Input <i>Tradable</i> (Rp)	Biaya Input <i>Non Tradable</i> (Rp)	Keuntungan (Rp)
Harga Privat	16.272.539,68	1.799.108	2.974.038	11.499.394
Harga Sosial	9.280.954,43	5.308.313	2.968.353	1.004.288
Divergensi	6.991.585	-3.509.206	5.685	10.495.106

Sumber: (Data Primer, 2023) Data Diolah

Sedangkan keuntungan sosial merupakan keuntungan yang dihitung pada tingkat harga sosial atau harga bayangan yaitu tingkat harga dimana tidak ada kebijakan pemerintah dan distorsi pasar (Wibisono et al., 2019). Keuntungan sosial atau *Social Profitability* (SP) yang diperoleh lebih besar dari nol yakni Rp.1.004.288, nilai keuntungan ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya kebijakan pemerintah maka petani akan mengalami keuntungan sebesar sebanyak nominal tersebut. Keuntungan yang diterima petani dihasilkan oleh tingginya penerimaan sosial usahatani jagung yang diterima petani. Hasil yang diperoleh sama halnya dengan penelitian Devi et al., (2020) dihasilkan nilai keuntungan privat lebih besar dari nilai keuntungan sosial, dikarenakan adanya peran pemerintah dalam penetapan harga output yang diterimapetani sehingga harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan harga sosialnya.

Dampak kebijakan pada input *tradable* bernilai negatif, kondisi ini menunjukkan telah terjadi penghematan biaya input *tradable* dimana pada harga privat petani memperoleh input *tradable* dengan harga lebih rendah. Pemerintah mendukung input *tradable* dengan memberikan subsidi pupuk. Divergensi keuntungan bernilai positif menunjukkan bahwa rata-rata usahatani jagung lebih untung ketika terdapat kebijakan pemerintah. Apabila dibandingkan antara keuntungan privat dengan keuntungan sosial yang diterima oleh petani, keuntungan privat usahatani jagung lebih tinggi daripada keuntungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada input maupun output jagung secara simultan masih memberikan insentif bagi petani, serta

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

telah berpengaruh nyata sehingga keuntungan privat yang diperoleh lebih tinggi dari keuntungan sosialnya.

Tabel 19. Analisis PAM Dampak Kebijakan

Keterangan	Indikator	Nilai
Kebijakan input	NPCI	0,34
Kebijakan output	NPCO	1,75
Kebijakan input-output	EPC	3,64
<i>Profitability Coefficient</i>	PC	11,45
Rasio subsidi	SRP	1,13
Daya saing kompetitif	PCR	0,21
Daya saing komparatif	DRCR	0,75

Sumber: (Data Primer, 2023) Data Diolah

Kebijakan input yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini kebijakan subsidi pupuk terhadap usahatani Jagung Lokal Varietas Manding diukur dengan indikator NPCI. Rumus ini menunjukkan rasio biaya input *tradable* pada harga privat dengan biaya input *tradable* pada harga sosial (Lestari et al., 2020). Hasil pada Tabel 19 diketahui nilai NPCI sebesar 0,34 atau NPCI lebih kecil dari satu. Nilai ini menjadi indikasi bahwa petani hanya membayar biaya pupuk sebesar 34 persen dari yang seharusnya dibayar jika tidak ada kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pupuk urea dan NPK pada pasar domestik lebih rendah dibandingkan dengan pasar internasional. Adanya kebijakan pemerintah berupa subsidi input usahatani jagung akan menjadikan usahatani Jagung Lokal Varietas Manding berdaya saing. Rahmaniayah & Rum, (2020) juga menyatakan usahatani jagung dapat berdaya saing secara kompetitif karena faktor-faktor inputnya disubsidi. Sejalan dengan penelitian Haryanto et al., (2018) kebijakan input yang ditetapkan pemerintah dinilai efektif apabila menghasilkan keuntungan bagi usahatani jagung. Dengan demikian kebijakan pupuk bersubsidi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, (2022) telah mampu memproteksi harga input *tradable*.

Kebijakan output yang dikeluarkan oleh pemerintah pada komoditas jagung adalah kebijakan harga dasar dan kebijakan tarif impor. Menurut Mantau, (2016) NPCO merupakan rasio antara penerimaan pada harga privat dengan penerimaan harga sosial. Hasil perhitungan NPCO diperoleh nilai sebesar 1,75 dimana nilai NPCO lebih besar dari satu, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan output jagung memberikan dampak positif dikarenakan harga jual jagung yang diterima petani di Kecamatan Manding lebih tinggi daripada harga sosialnya. Hal ini menyebabkan petani dapat menerima pendapatan lebih tinggi dari seharusnya. Berdasarkan fakta di lapang harga dasar komoditas jagung sebesar Rp.4.200 per kilogram, sedangkan harga yang

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

dijual petani mampu mencapai Rp.7.750 per kilogram, dan harga sosial sebesar US\$0,27 atau setara dengan Rp. 4.433 per kilogram. Kondisi di lapang menunjukkan bahwa jumlah produksi jagung sebesar 25,18 juta ton, sementara jumlah yang diekspor sebanyak 12,9 juta ton. Sedangkan jumlah kebutuhan jagung nasional mencapai 16,28 juta ton. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan sebesar 4 juta ton, Indonesia mengimpor jagung sebesar 28,42 ribu ton.jumlah tersebut belum mampu menutupi kekurangan dalam negeri karena pemerintah menetapkan kebijakan tarif impor sebesar 5 persen. Sehingga produksi dalam negeri tetap terlindungi dan harga di tingkat petani mengalami kenaikan karena permintaan yang meningkat. Dengan demikian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah telah efektif dan berpihak pada petani. hal ini senada dengan penelitian Darmayanti et al., (2019) kebijakan harga output di dalam negeri dapat dikendalikan serta mekanisme impor jagung telah diatur ketat melalui kebijakan tarif impor jagung. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan pemerintah perihal usahatani jagung telah bersifat insentif terhadap output. Melia et al., (2023) menjelaskan kebijakan output suatu komoditas harus komprehensif untuk meningkatkan sektor pertanian di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung usahatani jagung di Kecamatan Manding telah dapat berdaya saing dengan adanya proteksi output dari pemerintah.

Kebijakan pemerintah terhadap input dan output pada jagung dapat dilihat dari nilai EPC. Nilai EPC menggambarkan sejauh mana kebijakan pemerintah pada input dan output bersifat melindungi atau menghambat produksi dalam negeri (Darmayanti et al., 2019). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai EPC sebesar 3,64 dimana nilai EPC lebih besar dari satu artinya kebijakan pemerintah dianggap telah mampu memproteksi seluruh kegiatan usahatani jagung lokal Manding. Semakin besar nilai EPC maka semakin tinggi tingkat proteksi pemerintah terhadap komoditas pertanian jagung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadiyah & Rum, (2020) nilai EPC lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa secara simultan terdapat intervensi pemerintah terhadap usahatani jagung. Selaras dengan hasil penelitian Mantau, (2016) nilai EPC lebih besar 1 menunjukkan bahwa peluang ekspor akan memperoleh proteksi dari pemerintah. Kebijakan pemerintah saat ini sangat mendukung petani jagung dalam mengembangkan produksi jagung sehingga petani menerima sekitar 364 persen dari nilai sosialnya.

Produksi Jagung Lokal Varietas Manding akan cenderung menurun jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani. Sebagaimana hasil dari analisis nilai PC sebesar 11,45 atau PC lebih besar dari 1 yang kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang ada pada usahatani jagung memberikan insentif kepada petani, karena petani memperoleh keuntungan jauh lebih tinggi dari seharusnya. Pada nilai SRP komoditas jagung lokal Manding juga bernilai lebih besar dari satu atau sebesar 1,13 artinya kebijakan pemerintah mendukung atau menguntungkan usahatani jagung karena biaya yang diinvestasikan petani lebih besar

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

daripada nilai tambah keuntungan yang diterima petani. SRP bernilai positif maka distorsi kebijakan dapat meningkatkan keuntungan, dengan kata lain subsidi pada harga input yang diberikan oleh pemerintah saat ini telah cukup menguntungkan bagi petani dalam meningkatkan produksi jagung di Kecamatan Manding.

Hasil analisis PAM dapat dipergunakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap Jagung Lokal Varietas Manding, daya saing kompetitif dan komparatifnya. Nilai PCR lebih kecil dari 1, artinya kegiatan usahatani jagung memiliki keunggulan kompetitif. Semakin rendah nilai PCR maka menunjukkan tingkat keunggulan kompetitif semakin tinggi (Lestari et al., 2022). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai PCR pada usahatani jagung lokal Manding yakni 0,21 artinya setiap penerimaan privat yang telah dikurangi dengan input *tradable* sebesar 1 satuan, maka dibutuhkan biaya untuk membayar input *non tradable* (input domestik) sebesar 0,21 satuan. Dengan demikian petani jagung masih menerima keuntungan sebesar 0,79 satuan. Secara ekonomi produksi usahatani Jagung Lokal Varietas Manding dapat membayar biaya input domestik dalam harga privat, sehingga usahatani jagung di Kecamatan Manding efisiensi secara finansial atau memiliki keunggulan kompetitif. Sama halnya dengan penelitian Arfah et al., (2017) untuk memperoleh nilai tambah output sebesar satu satuan pada harga privat diperlukan tambahan biaya faktor domestik kurang dari satu satuan.

Sedangkan berdasarkan analisis DRCR diperoleh nilai usahatani Jagung Lokal Varietas Manding adalah 0,75 atau DRCR lebih kecil dari 1. Hal ini mengartikan bahwa jika penerimaan sosial yang telah dikurangi dengan biaya input *tradable* nya sebesar 1 satuan, maka masih dapat membayar biaya input *non tradable* sebesar 0,75 satuan. Dengan demikian petani masih menerima keuntungan sebesar 0,25 satuan. Kondisi ini menjadi indikator bahwa usahatani Jagung Lokal Varietas Manding telah efisien secara ekonomi dalam menggunakan sumberdaya, sehingga memiliki daya saing komparatif. Dengan kata lain untuk menghasilkan nilai tambah pada harga sosial dibutuhkan biaya sumberdaya domestik yang lebih kecil (Sukmaya et al., 2016). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara ekonomi akan lebih menguntungkan meningkatkan produksi dalam negeri dibandingkan mengimpor dari luar negeri. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al., (2014) yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan menekan jumlah impor.

C. Daya Saing Bawang Merah Sesudah Kebijakan Pupuk 2022

Petani Bawang Merah Varietas Rubaru menggunakan banyak input dalam kegiatan usahatannya, yaitu benih bawang merah, pupuk NPK, pupuk organik, Pupuk SP-36, pupuk kandang, pestisida, upah tenaga kerja, sewa lahan, dan peralatan pertanian yang digunakan seperti pada Tabel 20. Jumlah pupuk terbesar yang digunakan oleh petani adalah pupuk organik, mencapai 1.745,44 kg perhektar. Hal

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

ini dilakukan oleh petani dengan harapan pemberian pupuk ini, mampu menjaga kesuburan tanah yang sudah dalam keadaan kelebihan pupuk anorganik atau kimia. Selain itu tanaman yang menggunakan pupuk organik akan memiliki kualitas yang bagus, tanaman tidak mudah diserang oleh penyakit, dan hasil produksi bawang yang diperoleh lebih menyehatkan bagi manusia karena kandungan nutrisinya lebih lengkap (Hendriyana, 2022).

Tabel 20. Rata-Rata Jumlah Penggunaan Input pada Usahatani Bawang Merah Berdasarkan Harga Privat

Input	Satuan	Jumlah	Harga (Rp.)	Nilai (Rp.)
Benih	Kg/ha	742,37	55.000	40.830.079
NPK	Kg/ha	224,63	2.300	516.649
SP-36	Kg/ha	121,34	6.500	788.702
Pupuk Organik	Kg/ha	1.745,44	130	226.908
Pupuk Kandang	Kg/ha	1.055,56	500	527.778
Dolomit	Kg/ha	237,5	2.500	593.750
Insektisida,Herbisi da+ Fungisida	ml/ha	956,46	772,25	738.627
Upah Tenaga Kerja	HOK	58,81	75.000	4.410.869
Sewa Lahan			1.066.66 7	1.066.667
Penyusutan Alat				27.671

Sumber Data: (Data Primer diolah, 2023)

Pestisida yang dipakai pada usahatani Bawang Merah Varietas Rubaru adalah insektisida dengan merek Preza dan Demolish. Kedua insektisida tersebut, sangat efektif untuk mengendalikan hama ulat grayak dan lalat penggorok pada tanaman bawang merah (Anonymous, 2022). Sedangkan untuk merek herbisida yang sering digunakan petani yaitu Trail dan Goal. Kedua merek tersebut sama-sama berfungsi untuk mengendalikan gulma pada tanaman bawang merah (Anonymous, 2023). Merek fungisida yang sering digunakan oleh petani di daerah penelitian yaitu Remazole, Oktave, Amistar, dan Dithane. Merek remazole dan oktave digunakan petani di Desa Mandala untuk mengendalikan penyakit layu *fusarium sp* atau moler pada daun bawang merah. Petani menggunakan fungisida merek deconil dan dithane untuk penyakit bercak ungu yang ada didaun bawang merah. Kebanyakan petani di Desa Mandala masih belum menerapkan anjuran pemberian pestisida yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Praktik

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Hortikultura yang Baik. Pada pasal 32 ayat (3) yang menjelaskan bahwa pemberian pestisida untuk budidaya harus sesuai anjuran rekomendasi (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2021). Namun di Desa Mandala para petani bawang merah tidak mengikuti aturan pemberian pestisida dimana petani lebih memilih memberikan pestisida sesuai dengan kepercayaan turun temurun. Sebagai upaya pengendalian hama dan penyakit yang menyerang bawang merah, terdapat cara dalam menggunakan pestisida yang baik dan benar agar organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tidak resisten terhadap pestisida yaitu : (1) tepat jenis dan mutu; (2) pestisida yang digunakan telah terdaftar atau sudah berizin; (3) selektif, efektif terhadap jasad renik, mudah untuk terurai, dan memiliki daya racun yang rendah; (4) tidak kadaluarsa; (5) memperhatikan label dimana bentuk wadah masih baik dan merupakan produk asli; (6) pemberian pestisida dilakukan tepat waktu ketika hama ada pada stadium rentan; (7) pestisida kontak tidak cocok digunakan untuk hama yang ada didalam jaringan tanaman (Soleh, 2020).

Tenaga kerja yang digunakan sebesar 58,81 HOK yang merupakan total keseluruhan tenaga kerja keluarga dan tenaga kerja upah. Kebanyakan petani menggunakan tenaga kerja upah karena keterbatasan tenaga keluarga. Usahatani bawang merah tergolong sebagai usahatani yang berat dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Besaran upah yang diterima tenaga kerja, dengan lama kerja 8 jam sebesar Rp.75.000. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari upah yang diterima petani. Pengambilan nilai rata-rata ini disebabkan karena tidak adanya aturan baku terkait upah yang harus diterima pekerja pertanian, sehingga petani pemilik lahan satu dengan yang lain memberikan upah yang berbeda-beda untuk pekerjanya. Alokasi penggunaan tenaga kerja terbesar pada usahatani bawang merah adalah pengolahan lahan, tanam, dan panen, untuk kegiatan lain seperti pemeliharaan baik pemupukan, penyulaman, penyemprotan biasanya menggunakan tenaga kerja berasal dari dalam keluarga.

Terdapat tiga jenis lahan yang digunakan untuk kegiatan usahatani bawang merah yaitu milik sendiri, sewa, dan bagi hasil. Sistem bagi hasil di Mandala menggunakan pedoman 30/70, petani memperoleh 70% hasil panen dan pemilik lahan memperoleh 30%. Biaya yang ditanggung oleh petani penggarap meliputi biaya untuk membeli benih, pupuk, pestisida, dan alat pertanian, dan jika terjadi kerusakan pada tanaman maka kedua belah pihak yang menanggung kerugiannya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian Sudrajat (2022) yang membahas terkait bagi hasil. Sewa lahan di Desa Mandala dihitung berdasarkan satuan legu (satuan yang dipakai oleh orang Madura), dimana satu legu sama dengan 0,125 ha yang dihargai sebesar Rp. 400.000, sehingga harga sewa lahan untuk luas satu hektar dalam satu tahun dengan tiga kali musim

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

tanam sebesar Rp. 3.200.000. Harga sewa lahan dalam satu kali musim tanam di Desa Mandala yaitu Rp. 1.066.667.

Perhitungan biaya penyusutan alat pertanian dihitung dalam satuan rupiah (Rp) per hektar per satu kali musim tanam bawang merah yang dihitung menggunakan metode garis lurus (*Straight line methode*) dengan rumus nilai pembelian dikurangi dengan nilai sisa yang kemudian dibagi oleh umur ekonomis, nilai sisa adalah nilai dari alat saat sudah tidak bisa untuk digunakan lagi (Sudrajat, 2022). Penyusutan alat yang dihitung yaitu *handsprayer*, cangkul, dan sabit dengan nilai penyusutan sebesar Rp.27.671.

Penentuan nilai tukar bayangan atau *Shadow Exchange Rate* (SER) bertujuan untuk mendapatkan nilai rupiah bayangan pada input dan output *tradeable* agar mampu menyelesaikan perhitungan harga sosial (R. A. Pratama, Kusriani, et al., 2022). Berikut ini adalah perhitungan Nilai Tukar Bayangan (SER)

Tabel 21. Perhitungan SER

Nilai tukar resmi(OER)	= Rp.15.669
Penerimaan pajak impor(Tmt)	= Rp.135.4300.000.000.000
Penerimaan pajak ekspor(Txt)	= Rp.9.012.700.000.000
Total nilai impor(Mt)	= \$18.880.000.000/ (Rp.295.830.720.000.000)
Total nilai ekspor(Xt)	= \$149.530.000.000/(Rp.2.342.985.570.000.000)
Perhitungan nilai tukar bayangan (SER) :	
Xt + Mt	= Rp.2.638.816.290.000.000
Xt – Txt	= Rp.2.333.972.870.000.000
Mt + Tmt	= Rp.431.260.720.000.000
(Xt-Mt)+(Mt+Tmt)	= Rp.2.765.233.590.000.000
SCFT = $\frac{Xt + Mt}{(Xt - Txt) + (Mt + Tmt)}$	= 0,95
SER = OER/SCFT	= Rp.16.419,65

Sumber Data : (BPS, 2022), (BPS,2023)

Penentuan harga sosial pada input *tradeable* di usahatani Bawang Merah Rubaru menggunakan pendekatan nilai tukar bayangan atau *Shadow Exchange Rate* (SER), sedangkan untuk harga sosial untuk input dan output non-*tradeable*

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

menggunakan harga privat yang ada di petani (Maharani et al., 2015). Tabel 22 menunjukkan jumlah, harga dan nilai input yang digunakan oleh petani bawang merah di Desa Mandala.

Menurut Darmayanti et al., (2018) perhitungan harga bayangan pada input maupun output *tradeable* dibutuhkan data harga perbatasan CIF (*cost, insurance, and freight*) yaitu berupa harga impor ketika komoditas masih berada di pelabuhan domestik (untuk komoditas impor) yang kemudian diubah menjadi Rupiah per kilo, dengan menggunakan nilai SER sebesar Rp. 16.419,65,-per US\$. Kemudian ditambah dengan biaya transportasi dan bongkar muat dari pelabuhan tanjung perak Surabaya menuju ke Kabupaten Sumenep masing-masing Rp.200/kg dan Rp.33,33/kg, sehingga diperoleh harga bayangan input dan output usahatani Bawang Merah Rubaru.

Tabel 22. Penggunaan Input dalam Usahatani Bawang Merah Berdasarkan Harga Sosial

Input	Satuan	Jumlah	Harga (Rp.)	Nilai (Rp.)
Benih	Kg/ha	742,37	55.000	40.830.079
NPK	Kg/ha	224,63	10.282	2.309.677,87
SP-36	Kg/ha	121,34	12.006	1.456.821
Pupuk Organik	Kg/ha	1.745,4 4	1.957	3.416.527
Pupuk Kandang	Kg/ha	1.055,5 6	500	527.778
Dolomit	Kg/ha	237,5	1.957	464.882
Insektisida + Herbisidida + Fungisida	ml/ha	956,46	1.849	1.768.837
Upah Tenaga Kerja	HOK	58,81	75.000	4.410.869
Sewa Lahan			1.066.667	1.066.667
Penyusutan Alat				22.021

Sumber Data : (Data Primer diolah, 2023)

Perhitungan harga sosial pupuk NPK pada penelitian ini menggunakan harga CIF yang diperoleh dari World Bank (2023) yaitu sebesar 0,61 US\$ per kilogram. Nilai CIF dari pupuk SP-36 yang didasarkan pada harga CIF yaitu sebesar 0,72 US\$ per kilogram. Selanjutnya harga CIF untuk pupuk organik yaitu sebesar 0,11 US\$ per kilogram. Kemudian pestisida yang didasarkan pada harga CIF yaitu sebesar 0,10 US\$ per kilogram. Tahap terakhir perhitungan harga bayangan adalah mengalikan harga perbatasan CIF untuk pupuk NPK, SP-36, organik, dan pestisida dengan nilai SER yang ditambah dengan biaya transportasi dan bongkar muat. Tingginya harga sosial

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

jika dibandingkan dengan harga privatnya menunjukkan bahwa harga dalam negeri lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar internasional.

Harga sosial benih pada penelitian ini sama dengan harga privat hal ini karena varietas benih yang digunakan oleh petani di Desa Mandala adalah Varietas lokal yang tidak diperjual belikan di pasar internasional. Sedangkan perhitungan upah tenaga kerja sama dengan harga privatnya yakni sebesar Rp.75.000 untuk durasi waktu 8 jam. Besarnya upah diambil dari rata-rata tingkat upah di lokasi penelitian. Selanjutnya pendekatan yang dilakukan untuk menentukan harga sosial sewa lahan di Desa Mandala adalah nilai sewa lahan yang berlaku di desa ini yaitu Rp.1.066.667 dalam satu kali musim tanam.

Setelah identifikasi terhadap biaya privat dan sosial didapatkan, maka tahapan lebih lanjut dalam analisis ini adalah menghitung matrik PAM yang komponennya terdiri dari penerimaan, biaya input tradable dan non tradable yang dipergunakan, dan menghitung keuntungan. Hasil perhitungannya ditunjukkan dalam Tabel 23. Input *tradable* yang digunakan berupa pupuk NPK, pupuk, SP-36, Dolomit, Pupuk Organik, dan Pestisida, sedangkan untuk input non-tradable meliputi benih, pupuk kandang, sewa lahan, penyusutan alat, dan upah tenaga kerja.

Tabel 23. Hasil Perhitungan Matriks PAM pada Usahatani Bawang Merah Rubaru

	Penerimaan (Rp.)	Biaya Input <i>Tradable</i> (Rp.)	Biaya Input <i>Non-Tradable</i> (Rp.)	Keuntungan (Rp.)
Harga Privat	164.067.978,86	2.864.635,25	46.863.063,12	114.340.280,49
Harga Sosial	667.110.724,06	9.416.744,39	46.857.413,86	620.836.565,81
Divergensi	-513.042.745,21	-6.552.109,14	5.649,26	-506.496.285,31

Sumber Data : (Data Primer diolah, 2023)

Harga bawang merah yang dijual petani ke pedagang pengepul sebesar Rp.25.000/kg, sedangkan harga bawang merah di pasar mencapai Rp. 38.049/kg. Rendahnya harga privat bawang merah jika dibandingkan dengan harga sosialnya (57.797,17/kg). Tingginya harga sosial bawang merah belum dapat dinikmati oleh petani karena mereka belum memiliki kesempatan untuk menjual produknya di pasar internasional, melalui kegiatan ekspor. Berdasarkan hasil analisis PAM pada Tabel 23, diketahui bahwa kegiatan usahatani bawang merah yang dilakukan oleh petani di Desa Mandala memberikan keuntungan yang positif.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Hal ini berarti adanya campur tangan dari pemerintah mampu memberikan hasil yang positif pada usahatani Bawang Merah Rubaru yaitu sebesar Rp. 114.340.280,49 perhektar permusim taman. Sedangkan keuntungan sosial pada usahatani ini sebesar Rp. 620.836.565,81. Nilai positif yang dimiliki oleh keuntungan sosial menandakan bahwa kegiatan usahatani bawang merah yang dijalankan dapat bertahan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Keuntungan privat dan keuntungan sosial yang sama-sama memiliki nilai positif dapat diartikan bahwa usahatani Bawang Merah Rubaru menguntungkan dan layak secara finansial maupun ekonomi untuk diusahakan.

Divergensi pada harga input *tradable* mengakibatkan biaya input *tradable* pada harga privat berbeda dengan harga sosial dan transfer input *tradable*. Divergensi input *tradable* pada harga sosial usahatani ini bernilai negative, yaitu sebesar Rp. 6.552.109,14 yang artinya divergensi ini menjadi indikator adanya subsidi terhadap input *tradable*, dimana petani membayar input tradable lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan. Perbedaan harga ini disebabkan oleh tingginya harga dari input tradable yaitu harga pupuk dan pestisida yang kemudian diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga petani

Divergensi input *non-tradable* pada harga sosial bernilai positif yaitu sebesar Rp. 5.649,26 yang artinya divergensi ini disebabkan karena tidak adanya subsidi terhadap input *non-tradable*. Transfer bersih menunjukkan selisih antara keuntungan sosial dan privat. Hasil analisis data didapatkan nilai transfer bersih Bawang Merah Rubaru sebesar Rp. -506.496.285,32. Transfer bersih yang bernilai dapat diartikan bahwa ada kebijakan pemerintah baik input atau output baik *tradable* maupun *non-tradable* yang merugikan petani bawang merah karena menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh petani. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Andriani & Hanani (2015) terkait analisis keunggulan kompetitif dan komparatif pada usahatani apel. Nilai tranfer bersih pada usahatani apel bernilai negatif yang berarti terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi pasar, merugikan petani apel di Kecamatan Poncokusumo.

Pengukuran dampak kebijakan dilakukan untuk mengetahui pengaruh adanya perubahan kebijakan subsidi pupuk terhadap daya saing komoditas Bawang Merah Rubaru di Desa Mandala. Hasil Perhitungan PAM Dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani Bawang Merah di Desa Mandala dijelaskan pada Tabel 24.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 24. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Daya Saing Produk Bawang Merah

Koefisien	Nilai
NPCO	0,24
NPCI	0,30
EPC	0,24
PC	0,18
SRP	-0,75
PCR	0,29
DRCR	0,07

Sumber Data : (Data Primer diolah, 2023)

Dampak kebijakan pada Bawang Merah Rubaru dapat dibedakan menjadi tiga yaitu dampak kebijakan output, input, dan input-output. Dampak kebijakan pemerintah terhadap penyerahan pajak hasil pertanian, masuk dalam kategori kebijakan output. Indikator untuk mengukurnya adalah nilai NPCO. Hasil perhitungan didapatkan nilai NPCO sebesar 0,24. Nilai NPCO kurang dari satu memiliki makna bahwa pemerintah tidak memberikan proteksi terhadap output bawang merah. Besarnya nilai NPCO pada bawang merah sebesar 0,24 dapat diartikan bahwa petani bawang merah menerima harga 76 persen lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu menjelaskan bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen dari harga jual (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan kepada Bawang Merah Rubaru sebesar 1,1 persen. Kebijakan ini tidak melindungi petani bawang merah untuk meningkatkan produksinya. Adanya kebijakan output lebih menguntungkan konsumen, karena dapat membeli bawang merah dengan harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya harus dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmaya et al. (2016) pada usahatani kedelai di Lamongan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah permasalahan rendahnya harga output bawang merah adalah mengintegrasikan petani ke sektor lain seperti sektor industri dengan cara melakukan kemitraan (Fidyansari et al., 2016). Peraturan Kementerian Republik Indonesia yang mengatur terkait landasan peraturan kemitraan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 dapat dijadikan dasar untuk menerapkan kemitraan usahatani Bawang Merah Rubaru, agar harga yang diperoleh petani stabil dan lebih menguntungkan baik saat panen raya atau tidak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fidyansari et al., (2016), dimana petani memperoleh peningkatan keuntungan setelah bergabung dengan kemitraan.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Dampak kebijakan terkait input *tradable* dapat dilihat dari nilai koefisien *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI) (Bayzidnejad et al., 2020). Nilai NPCI dari komoditas Bawang Merah Rubaru sebesar 0,30 kurang dari satu. Hal ini berarti kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah pada pupuk urea dan NPK menyebabkan petani membayar biaya input *tradable* sebesar 30 persen dari biaya yang harus ditanggung oleh petani jika tidak ada kebijakan subsidi. Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Walau petani telah menerima subsidi pupuk, namun kebutuhan pupuk tersebut masih lebih besar dibandingkan dengan jumlah kebutuhannya. Menurut penjelasan 90 persen responden menyatakan bahwa lebih dari 50 persen kebutuhan pupuk mereka, tidak terpenuhi oleh kebijakan subsidi pupuk. Rata-rata mereka kebutuhan pupuk yang dapat dipenuhi dari subsidi hanya sekitar 42 persen.

Kemanfaatan yang dapat diterima karena adanya kebijakan pemerintah, dapat dilihat dari indikator EPC. Nilai EPC menggambarkan bagaimana suatu kebijakan pemerintah mampu melindungi atau menghambat produksi dalam negeri (Chowdhury, 2020). EPC adalah selisih antara penerimaan yang dikurangi biaya input *tradable* pada harga privat, kemudian dibagi dengan selisih penerimaan yang dikurangi dengan input *tradable* pada harga sosial (Kurniawan et al., 2021). Hasil analisis usahatani Bawang Merah Rubaru menunjukkan bahwa nilai EPC adalah 0,24. Ini berarti nilai EPC kurang dari satu, yang artinya dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output bawang merah di lokasi penelitian masih belum berjalan secara efektif atau dapat diartikan bahwa kebijakan pemerintah justru menghambat upaya peningkatan produksi. Hal ini dapat terjadi karena jumlah kuota pupuk yang diberikan lebih kecil dari kebutuhan. Selain itu keterlambatan ketersediaan pupuk juga dapat menyebabkan pertumbuhan komoditas bawang merah kurang optimal, sehingga berpengaruh pada produktifitas usahatani bawang merah. Dari sisi kebijakan output, pemerintah memberlakukan pajak bagi hasil pertanian, dan tidak terdapat kebijakan harga dasar untuk komoditas bawang merah. Sistem pembentukan harga bawang merah didasarkan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar, sehingga menyebabkan fluktuasi harga yang sangat cepat. Ketidakstabilan harga tersebut mengakibatkan petani merugi karena menjual bawang merah dibawah harga yang seharusnya didapatkan (Asmara & Ardhiani, 2015). Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terhambatnya upaya peningkatan produksi bawang merah di Desa Mandala.

Profitability Coefficient (PC) adalah rasio antara keuntungan pada harga privat dengan keuntungan pada harga sosial. Nilai ini menunjukkan pengaruh gabungan pada input *tradable*, output, dan input *non-tradable*. Nilai PC digunakan untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat keuntungan privat dan keuntungan sosial (Kurniawan et al., 2021). Petani Bawang

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Merah Rubaru di Desa Mandala memiliki nilai PC sebesar 0,18. Nilai PC kurang dari satu artinya adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada input dan atau output menyebabkan pengurangan keuntungan yang diterima oleh petani. Kondisi ini menunjukkan secara akumulasi, kebijakan pemerintah tidak memberikan insentif kepada produsen. Hal ini disebabkan adanya kebijakan baru terkait subsidi pupuk tahun 2022 dimana petani hanya mendapatkan dua jenis pupuk. Pupuk lain yang dibutuhkan dalam usahatani bawang merah tidak disubsidi dan petani harus membayar mahal untuk mendapatkan pupuk tersebut, sehingga petani harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk menjalankan usahatani ini dan keuntungan yang diterima semakin berkurang.

Selanjutnya untuk melihat dampak kebijakan pemerintah terhadap keuntungan yang diterima oleh petani, dapat digunakan indikator SRC. Nilai SCR menggambarkan rasio antara transfer bersih dengan penerimaan yang diperoleh pada harga sosial (Nolasary, 2019a). Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai SRP pada usahatani Bawang Merah Rubaru sebesar - 0,75. Nilai SCR kurang dari nol memiliki arti bahwa kebijakan pemerintah pada komoditas bawang merah mengurangi keuntungan petani. Adanya kebijakan subsidi pupuk tahun 2022 menjadikan tanggungan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk yang dibutuhkan dalam usahatani bawang merah semakin meningkat karena terdapat beberapa pupuk yang dicabut subsidinya oleh pemerintah yaitu SP-36, dan pupuk organik. Kebanyakan petani di Desa Mandala tetap membeli pupuk SP-36 dan pupuk organik untuk tanaman mereka. Petani mengakali kenaikan harga pupuk dengan cara mengurangi jumlah pupuk yang diberikan untuk tanaman mereka, namun terdapat beberapa petani dengan luas lahan hampir satu hektar tetap memberikan pupuk SP-36 dan pupuk organik tanpa mengurangi jumlah pupuk yang diberikan ke tanaman.

Analisis daya saing kompetitif dapat diukur dengan menggunakan nilai PCR. Keunggulan kompetitif menjadi ukuran apakah petani di Desa Mandala memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan untuk usahatani Bawang Merah Varietas Rubaru atau tidak. Selanjutnya Darmayanti et al., (2018) mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif menunjukkan sejauh mana usahatani yang dilakukan dapat membiayai faktor domestik pada harga privat. Nilai PCR untuk usahatani Bawang Merah Rubaru sebesar 0,29. Nilai PCR yang dari kurang satu, memberikan gambaran usahatani ini memiliki daya saing kompetitif dan layak untuk diusahakan. Nilai PCR tersebut di atas menunjukkan jika setiap penerimaan privat yang telah dikurangi dengan biaya input *tradable* sebesar satu satuan, maka dibutuhkan biaya untuk membayar input *non-tradable* (input domestik) sebesar 0,29 satuan. Dengan demikian petani bawang merah masih menerima keuntungan sebesar 0,71 satuan. Secara ekonomi produksi usahatani Bawang Merah Rubaru dapat membayar biaya input domestik dalam harga privat, sehingga usahatani ini efisien atau memiliki daya saing

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

kompetitif. Hal tersebut sejalan dengan hasil analisis Santoso et al. (2020) yang menyatakan bahwa usahatani bawang merah di Majalengka memiliki keunggulan kompetitif dengan nilai PCR kurang dari satu yaitu sebesar 0,72.

Berdasarkan teori keunggulan komparatif, perdagangan antara dua negara terjadi apabila setiap negara mempunyai biaya relatif yang kecil pada jenis barang yang berbeda. Teori ini berfokus pada perbandingan biaya relatif yang dikeluarkan oleh suatu negara dalam memproduksi barang yang dijadikan sebagai dasar terjadinya perdagangan antar negara (Setiawati, 2021). Keunggulan komparatif dapat diperoleh jika suatu negara mampu memproduksi suatu barang pada *opportunity cost* yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, atau dengan kata lain suatu negara mampu memproduksi barang dengan efisiensi relatif yang paling tinggi dibandingkan dengan semua produk lain sejenis (Widiastuti et al., 2021). Keunggulan komparatif dapat dianalisis menggunakan *Domestic Resource Cost Ratio* (DRCR) (Wibisono et al., 2019). Nilai DRCR menunjukkan banyaknya faktor domestik yang mampu untuk dihemat selama menghasilkan satu satuan unit, semakin kecil nilai DRCR yang diperoleh maka semakin tinggi keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu komoditas (Rahmadona et al., 2017). Nilai DRCR usahatani Bawang Merah Rubaru adalah 0,07 kurang dari satu. Nilai DRCR kurang dari satu diartikan setiap penerimaan sosial yang telah dikurangi dengan biaya input *tradable* sebesar satu satuan, maka biaya input *non-tradable* yang harus dikeluarkan oleh petani sebesar 0,07 satuan. Dengan demikian petani masih menerima keuntungan sebesar 0,93 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani ini memiliki keunggulan komparatif yang tinggi. Dengan demikian adanya perubahan kebijakan pupuk tahun 2022 tidak terlalu berpengaruh pada usahatani Bawang Merah Rubaru. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Hidayari & Aji (2017), yang menghasilkan simpulan bahwa usahatani apel di Malang masih memiliki keunggulan komparatif dengan keuntungan yang besar dan efisien dalam penggunaan input *non-tradable*.

D. Daya Saing Padi Sesudah Kebijakan Pupuk 2022

Input yang digunakan dalam kegiatan usahatani padi di Kecamatan Gapura meliputi benih padi, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk NPK, pupuk organik, pupuk SP-36, pestisida (insektisida dan herbisida), tenaga kerja, dan peralatan pertanian, seperti yang terlihat pada Tabel 25:

Tabel 25. Penggunaan Input Berdasarkan Harga Privat pada Usahatani Padi di Kecamatan Gapura

Input	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Benih	Kg/Ha	50,28	12.000	603.323
Pupuk Kandang	Kg/Ha	519,29	500	259.643

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Input	Satuan	Jumlah	Harga (Rp)	Nilai (Rp)
Urea	Kg/Ha	215,78	2.250	485.503
ZA	Kg/Ha	40	5.000	200.000
NPK	Kg/Ha	209,80	2.300	482.547
Pupuk Organik	Kg/Ha	3.600	130	468.000
SP-36	Kg/Ha	20	6.500	130.000
Insektisida + Herbisida	ml/Ha	1948,20	675	1.315.036
TK	HOK/Ha	18,91	60.000	1.134,.431
Sewa Lahan			800.000	800.000
Penyusutan alat			16.594	16.594

Sumber: (Data Primer, 2023) Data Diolah

Mayoritas petani padi menggunakan benih padi varietas Inpari 42, Ciherang, dan IR 64. Ketiga varietas tersebut dipilih karena memiliki keunggulan yang berbeda tergantung kehendak para petani, namun mayoritas petani lebih memilih padi varietas Inpari 42. Salah satu keunggulan varietas Inpari 42 dapat memiliki anakan produktif sebanyak 18 malai/rumpun dengan potensi hasil 7,10 ton/hektar (Agroteknologi, 2021). Penggunaan dosis pupuk terbesar adalah pupuk kandang, pupuk organik, dan pupuk urea. Hal ini disebabkan para petani terbiasa mengaplikasikan pupuk urea dengan dosis lebih tinggi dibandingkan NPK untuk membuat daun padi tampak lebih segar, sehat, dan hijau. Sedangkan manfaat pupuk kandang dapat memperbaiki kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi tanah (Sholihah & Saputro, 2016). Disamping itu, pupuk organik juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan padi yaitu untuk meningkatkan kandungan air dan mampu menahan air pada tanah pasir serta meningkatkan unsur hara dalam tanah (Abdul Rochman, 2020).

Jenis pestisida yang digunakan adalah insektisida dan herbisida. Merek insektisida yang digunakan adalah Buldok, Curacron, dan Sidatan. Insektisida ini diaplikasikan sebab petani mengalami kendala dalam mengendalikan serangan hama seperti penggerek batang, wereng, dan walang sangit. Merek herbisida yang digunakan adalah Tabas dan Ally plus untuk mengatasi gulma pada tanaman padi.

Sementara itu, tenaga kerja yang digunakan berasal dari tenaga kerja upah atau diluar keluarga petani dengan upah yang dibayarkan sejumlah Rp.60.000,00 per 8 jam kerja sebagai upah harian. Mayoritas petani di Kecamatan Gapura dalam kegiatan usahatani padi yang dilakukan biasanya di lahan pribadi, atau secara bagi hasil maupun sewa. Mekanisme bagi hasil yang berlaku di petani adalah 70% hasil produksi milik penggarap atau petani sedangkan sisanya 30% dimiliki oleh pemilik lahan. Sedangkan sewa akan dibayarkan oleh petani sebesar Rp.2.400.000,00 dalam kurun waktu satu tahun dengan tiga kali musim tanam. Peralatan yang digunakan

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

petani dalam membantu kegiatan usaha taninya terdiri dari cangkul, ember, sabit, dan *hand sprayer* namun terdapat beberapa peralatan yang disewa oleh petani ketika kegiatan pengolahan lahan sampai dengan pemanenan yaitu *hand traktor*, *combine*, dan pompa air atau bor.

Harga output padi yang berlaku di pasaran sebesar Rp.12.000,00 per Kg dengan berupa beras. Mayoritas petani menjual outputnya kepada penggiling beras. Selain identifikasi dan analisis terhadap input yang dipergunakan dalam usahatani padi, maka untuk menggunakan analisis PAM diperlukan perhitungan terhadap nilai tukar bayangan. Nilai tukar bayangan atau *Shadow Exchange Rate* (SER) bertujuan untuk mendapatkan nilai rupiah bayangan pada input dan output *tradeable* agar mampu menyelesaikan perhitungan harga sosial (R. A. Pratama, Kusrimi, et al., 2022). Penentuan SER dihitung dengan membagi nilai tukar resmi tahun ke-t dengan faktor konversi standar tahun ke-t. berdasarkan hasil perhitungan seperti tersaji dalam Tabel berikut, dengan nilai SER tahun 2023 adalah Rp.16.419,65.

Penentuan nilai tukar bayangan atau *Shadow Exchange Rate* (SER) bertujuan untuk mendapatkan nilai rupiah bayangan pada input dan output *tradeable* agar mampu menyelesaikan perhitungan harga sosial (R. A. Pratama, Kusrimi, et al., 2022).

Nilai tukar resmi(OER)	= Rp.15.669
Penerimaan pajak impor(Tmt)	= Rp.135.4300.000.000.000
Penerimaan pajak ekspor(Txt)	= Rp.9.012.700.000.000
Total nilai impor(Mt)	= \$18.880.000.000/ (Rp.295.830.720.000.000)
Total nilai ekspor(Xt)	= \$149.530.000.000/(Rp.2.342.985.570.000.000)
Perhitungan nilai tukar bayangan (SER) :	
Xt + Mt	= Rp.2.638.816.290.000.000
Xt – Txt	= Rp.2.333.972.870.000.000
Mt + Tmt	= Rp.431.260.720.000.000
(Xt-Mt)+(Mt+Tmt)	= Rp.2.765.233.590.000.000
SCFT = $\frac{Xt + Mt}{(Xt - Txt) + (Mt + Tmt)}$	= 0,95
SER = OER/SCFT	= Rp.16.419,65

Sumber Data : (BPS, 2022), (BPS,2023)

Penentuan harga sosial pada input *tradeable* di usahatani padi menggunakan pendekatan nilai tukar bayangan atau *Shadow Exchange Rate* (SER), sedangkan harga sosial untuk input dan output non-*tradeable* menggunakan harga privat yang ada di petani (Darmayanti et al., 2018). Menurut Darmayanti et al., (2018) perhitungan

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

harga bayangan pada input maupun output *tradeable* dibutuhkan data harga perbatasan CIF (*cost, insurance, and freight*) yaitu berupa harga impor ketika komoditas masih berada di pelabuhan domestik (untuk komoditas impor) yang kemudian diubah menjadi Rupiah per kilo, dengan menggunakan nilai SER sebesar Rp. 16.419,65,-per US\$. Kemudian ditambah dengan biaya transportasi dan bongkar muat dari pelabuhan tanjung perak Surabaya menuju ke Kabupaten Sumenep masing-masing Rp.200/kg dan Rp.33,33/kg, sehingga diperoleh harga bayangan input dan output usahatani Padi di Kecamatan Gapura.

Perhitungan harga sosial pupuk NPK pada penelitian ini menggunakan harga CIF yang diperoleh dari World Bank (2023) yaitu sebesar 0,61 US\$ per kilogram. Nilai CIF dari pupuk SP-36 yang didasarkan pada harga CIF yaitu sebesar 0,72 US\$ per kilogram. Selanjutnya harga CIF untuk pupuk Urea yaitu sebesar 0,31 US\$ per kilogram. Kemudian pestisida yang didasarkan pada harga CIF yaitu sebesar 0,10 US\$ per kilogram. Tahap terakhir perhitungan harga bayangan adalah mengalikan harga perbatasan CIF untuk pupuk NPK, SP-36, Urea, dan pestisida dengan nilai SER yang ditambah dengan biaya transportasi dan bongkar muat. Tingginya harga sosial jika dibandingkan dengan harga privatnya menunjukkan bahwa harga dalam negeri lebih rendah jika dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar internasional.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 26. Penggunaan Input Berdasarkan Harga Sosial pada Usahatani Padi di Kecamatan Gapura

Input	Satuan	Jumlah	Harga (Rp.)	Nilai (Rp.)
Benih	kg/ha	50,28	12.000	603.323
Pupuk Kandang	kg/ha	519,29	500	259.643
Urea	kg/ha	215,78	5.146	110.399
ZA	kg/ha	40	20.902	836.089
NPK	kg/ha	209,80	10.282	2.157.228
Pupuk Organik	kg/ha	3600	1.957	7.046.628
SP-36	kg/ha	20	12.006	240.124
Insektisida + Herbisida	ml/ha	1948,20	1.849	3.602.916
Tenaga Kerja	HOK	18,91	60.000	1.134.431
Sewa Lahan			800.000	800.000
Penyusutan alat			22.021	22.21

Penentuan harga sosial benih pada penelitian ini sama dengan harga privat hal ini dikarenakan varietas benih yang digunakan oleh petani di Kecamatan Gapura adalah Varietas lokal yang tidak diperjual belikan di pasar internasional. Petani di lokasi penelitian menggunakan tiga jenis benih varietas lokal yaitu Ciherang, Inpari 42, dan IR 64. Perhitungan biaya upah tenaga kerja sama dengan harga privatnya yaitu sebesar Rp.60.000 untuk durasi waktu kerja 8 jam. Besarnya upah yang diterima petani merupakan rata-rata tingkat upah yang ada di lokasi penelitian. Selanjutnya penentuan harga sosial sewa lahan di Kecamatan Gapura yaitu Rp. 800.000 dalam satu kali musim tanam.

Setelah identifikasi terhadap biaya privat dan sosial didapatkan, maka tahapan lebih lanjut dalam analisis ini adalah menghitung matrik PAM yang komponennya terdiri dari penerimaan, biaya input tradable dan non tradable yang dipergunakan, dan menghitung keuntungan. Hasil perhitungannya ditunjukkan dalam tabel Input *tradable* yang digunakan berupa pupuk NPK, pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk organik dan Pestisida, sedangkan untuk input non-tradable meliputi benih, pupuk kandang, sewa lahan, penyusutan alat, dan upah tenaga kerja

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Tabel 27. Perhitungan Analisis PAM

	Penerimaan (Rp)	Biaya Input Tradable(Rp)	Biaya Input Non-Tradable (Rp)	Keuntungan (Rp)
Harga Private	42.202.284,55	3.081.085,43	3.613.990,98	35.507.208,14
Harga Sosial	53.638.254,14	14.993.384,58	2.819.418,64	35.825.450,93
Divergensi	- 1.435.969,60	- 11.912.299,15	794.572,34	- 318.242,79

Harga padi yang dijual petani ke pedagang pengepul sebesar Rp.12.000/kg, sedangkan harga padi di pasar mencapai Rp.13.000/kg. Rendahnya harga privat padi jika dibandingkan dengan harga sosialnya disebabkan karena petani masih kurang dalam mengakses pasar dan mengetahui peluang yang dimiliki oleh petani. Harga privat padi lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga sosialnya yaitu Rp. 10.249,97. Tingginya harga privat padi disebabkan karena biaya produksi yang ditanggung petani lebih besar, sehingga harga beras Indonesia lebih mahal dari negara-negara lain di Asia. Pada tabel diatas diketahui bahwa kegiatan usahatani padi yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Gapura memberikan keuntungan yang positif, hal ini berarti adanya campur tangan dari pemerintah mampu memberikan hasil yang positif pada usahatani padi yaitu sebesar Rp. 35.507.208,14 perhektar permusim tanam. Sedangkan keuntungan sosial pada usahatani ini sebesar Rp. 35.825.450,93 nilai positif yang dimiliki oleh keuntungan sosial mengindikasikan bahwa kegiatan usahatani padi yang dijalankan dapat bertahan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Keuntungan privat dan keuntungan sosial yang sama-sama memiliki nilai positif dapat diartikan bahwa usahatani padi menguntungkan dan layak secara finansial maupun ekonomi untuk diusahakan .

Divergensi pada harga input *tradable* mengakibatkan biaya input *tradable* pada harga privat berbeda dengan harga sosial dan transfer input *tradable*. Divergensi input *tradable* pada harga sosial usahatani ini bernilai negatif yaitu sebesar -Rp. 11.912.299,15 yang artinya divergensi ini disebabkan oleh adanya subsidi terhadap input *tradable*, dimana petani tidak membayar input tradable dari biaya yang seharusnya dibayarkan. Perbedaan harga ini disebabkan oleh tingginya harga dari input tradable yaitu harga pupuk dan pestisida yang kemudian diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga petani mendapatkan keuntungan.

Divergensi input *non-tradable* pada harga sosial bernilai positif yaitu sebesar Rp. 794.572,34 yang artinya divergensi ini disebabkan karena tidak adanya subsidi

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

terhadap input *non-tradable*. Transfer bersih menunjukkan selisih antara keuntungan sosial dan privat. Hasil analisis data didapatkan nilai transfer bersih padi di Kecamatan Gapura sebesar -Rp. 318.242,79. Dengan transfer bersih yang bernilai negatif maka dapat diartikan bahwa ada kebijakan pemerintah baik input atau output baik *tradable* maupun *non-tradable* yang merugikan petani padi karena menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh petani. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratama et al., (2022) terkait analisis daya saing usahatani, dimana nilai transfer bersih pada usahatani di lokasi penelitian bernilai negatif yang berarti terdapat kebijakan pemerintah atau distorsi pasar yang merugikan petani.

Tabel 28. Analisis PAM Dampak Kebijakan Pemerintah

Koefisien	Formula	Nilai
NPCI	B/F	0,21
NPCO	A/E	0,79
EPC	$(A-B)/(E-F)$	1,01
PC	D/H	0,99
SRP	L/E	-0,01
PCR	$C/(A-B)$	0,09
DRCR	$G/(E-F)$	0,07

Sumber: (Data Primer diolah, 2023)

Kebijakan input yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini kebijakan subsidi pupuk terhadap usahatani padi diukur dengan indikator NPCI. Indikator ini menunjukkan rasio biaya input *tradable* pada harga privat dengan biaya input *tradable* pada harga sosial (Lestari et al., 2022). Hasil pada Tabel 28, diketahui nilai NPCI sebesar 0,21 lebih kecil satu. Hal ini mengindikasikan bahwa petani hanya membayar biaya pupuk sebesar 21% dari yang seharusnya dibayar apabila tidak ada kebijakan pemerintah. Input pupuk urea dan NPK pada pasar domestik lebih rendah dibandingkan dengan pasar internasional. Adanya kebijakan pemerintah berupa subsidi input usahatani padi akan menjadikan usahatani padi di Kecamatan Gapura berdaya saing. Dengan demikian kebijakan pupuk bersubsidi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, (2022) telah mampu memproteksi harga input *tradable*.

Kebijakan output yang ditetapkan pemerintah pada komoditas padi adalah kebijakan harga eceran tertinggi beras. Indikator nilai NPCO merupakan rasio antara penerimaan pada harga privat dengan penerimaan harga sosial. Hasil perhitungan NPCO diperoleh nilai sebesar 0,79 lebih kecil dari satu, menunjukkan tidak berpengaruhnya kebijakan pemerintah terhadap harga output, menyebabkan nilai total

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

output 21% lebih rendah dari yang seharusnya. Berdasarkan fakta di lapang harga dasar komoditas padi medium sebesar Rp.10.900 per kilogram dan beras premium sebesar Rp.13.900 per kilogram sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, (2023). Sementara harga yang dijual petani sebesar Rp.12.000 per kilogram dan harga sosial sebesar US\$1,45. Dengan demikian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah belum efektif dan cenderung belum berpihak pada petani. Hal ini menjadi indikasi bahwa kebijakan pemerintah perihal usahatani jagung masih bersifat disinsentif terhadap output, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun usahatani padi berdaya saing akan tetapi pada wilayah tersebut kebijakan pemerintah belum bersifat protektif terhadap output jagung.

Kebijakan pemerintah terhadap input dan output pada jagung dapat dilihat dari nilai EPC. Nilai EPC menunjukkan sejauh mana kebijakan pemerintah pada input dan output bersifat melindungi atau menghambat produksi dalam negeri (Darmayanti, Surya, et al., 2018). Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai EPC sebesar 1,01 lebih besar dari satu, artinya kebijakan pemerintah dianggap telah mampu memproteksi seluruh kegiatan usahatani padi. Hal ini dapat terjadi karena petani menggunakan alternatif pupuk lain yang masih memiliki manfaat yang sama dimana pupuk tersebut masih masuk dalam subsidi pemerintah, sehingga mampu menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Dari sisi kebijakan output, pemerintah memberlakukan kebijakan harga dasar acuan padi. Adanya kebijakan tersebut menjadikan harga padi ditingkat petani menjadi stabil dan tingkat penyerapan hasil produksi semakin meningkat. Kestabilan harga tersebut menjadikan petani untuk meningkatkan keuntungan yang diterima karena mampu menjual hasil produksinya dengan harga yang stabil (Asmara & Ardhiani, 2015). Hal ini dapat menjadi salah satu pendorong upaya peningkatan produksi padi di Kecamatan Gapura.

Profitability Coefficient (PC) adalah rasio antara keuntungan pada harga privat dengan keuntungan pada harga sosial. Nilai ini menunjukkan pengaruh gabungan pada input *tradable*, output, dan input *non-tradable*. Nilai PC digunakan untuk mengetahui dampak dari kebijakan yang menyebabkan adanya perbedaan tingkat keuntungan privat dan keuntungan sosial (Kurniawan et al., 2021). Nilai PC dari usahatani padi di Kecamatan Gapura sebesar 0,99. Nilai PC kurang dari satu artinya adanya kebijakan yang diterapkan pemerintah pada input dan output menyebabkan pengurangan keuntungan yang diterima petani.

Pada nilai SRP komoditas padi juga bernilai kurang dari satu yaitu -0,01 artinya adanya kebijakan pemerintah saat ini para petani yang mengusahakan komoditas padi membayar biaya produksi dengan nilai lebih tinggi dari biaya imbalan berproduksinya (*opportunity cost*). SRP bernilai negatif maka distorsi kebijakan dapat menurunkan

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

keuntungan, sekaligus adanya transfer akibat kebijakan pemerintah yang berlaku selama ini menyebabkan pendapatan petani padi menurun sehingga menjadi lebih rendah tanpa adanya kebijakan.

Hasil analisis PAM dapat dipergunakan untuk menghitung dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi, daya saing kompetitif dan komparatifnya. Nilai PCR lebih kecil dari 1, artinya kegiatan usahatani jagung memiliki keunggulan kompetitif. Semakin rendah nilai PCR maka menunjukkan tingkat keunggulan kompetitif semakin tinggi (Lestari et al., 2022). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai PCR pada usahatani jagung lokal Manding yakni 0,09 artinya setiap penerimaan privat yang telah dikurangi dengan input *tradable* sebesar 1 satuan, maka dibutuhkan biaya untuk membayar input *non tradable* (input domestik) sebesar 0,09 satuan. Dengan demikian petani padi masih menerima keuntungan sebesar 0,91 satuan. Secara ekonomi produksi usahatani padi dapat membayar biaya input domestik dalam harga privat, sehingga usahatani padi di Kecamatan Gapura efisiensi secara finansial atau memiliki keunggulan kompetitif. Sama halnya dengan penelitian Arfah et al., (2017) untuk memperoleh nilai tambah output sebesar satu satuan pada harga privat diperlukan tambahan biaya faktor domestik kurang dari satu satuan

Sedangkan berdasarkan analisis DRCR diperoleh nilai usahatani padi adalah 0,07 atau DRCR lebih kecil dari 1. Hal ini mengartikan bahwa jika penerimaan sosial yang telah dikurangi dengan biaya input *tradable* nya sebesar 1 satuan, maka masih dapat membayar biaya input *non tradable* sebesar 0,07 satuan. Dengan demikian petani masih menerima keuntungan sebesar 0,93 satuan. Kondisi ini menjadi indikator bahwa usahatani padi telah efisien secara ekonomi dalam menggunakan sumberdaya, sehingga memiliki daya saing komparatif. Dengan kata lain untuk menghasilkan nilai tambah pada harga sosial dibutuhkan biaya sumberdaya domestik yang lebih kecil (Sukmaya, Rachmina, & Saptana, 2016). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa secara ekonomi akan lebih menguntungkan meningkatkan produksi dalam negeri dibandingkan mengimpor dari luar negeri. Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawan et al., (2014) yang menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan menekan jumlah impor.

Berdasarkan telah terhadap tingkat efisiensi dan daya saing pada tiga jenis usahatani di Kabupaten Sumenep maka dapat diformulasikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing setelah diberlakukan kebijakan pupuk tahun 2022. Terdapat dua solusi yang dapat dilakukan yaitu :

1. Solusi yang bersifat internal, yang didorong dari sisi petani dan usahatani yang dilakukan
2. Solusi yang berasal dari eksternal, yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Gambaran mengenai kedua solusi tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rochman. (2020). Analisis Usaha Tani Padi Menggunakan Pupuk Organik.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

Jurnal Unita, 1(1), 13–23.

Agroteknologi, P. I. (2021). *Penanaman Padi Varietas Inpari 42 Agritan GSR di PIAT UGM*. Agroteknologi, Pusat Inovasi.

Ahmad, Z., & Wibowo, R. (2021). Dampak Kebijakan Kartu Tani terhadap Produksi dan Efisiensi Usahatani Padi di Kabupaten Jember. *Jurnal Pangan*, 30(2), 107–116. <https://doi.org/10.33964/jp.v30i2.540>

Al, L. O. A. A. et. (2023). *provinsi jawa timur dalam angka 2023*. BPS Jawa Timur.

Aldila, H. F., Fariyanti, A., & Tinaprilla, N. (2017). Daya Saing Bawang Merah Di Wilayah Sentra Produksi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 14(1), 43–53. <https://doi.org/10.17358/jma.14.1.43>

Andriani, D. R., & Hanani, N. (2015). Analisis Keunggulan Kompetitif dan Komparatif Usahatani Apel di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Agrise*, 10(1), 1412–1425.

Anonymous. (2022). *Preza 100 OD*. FMC an Agricultural Sciences Company.

Anonymous. (2023). *Goal 24 EC*. Cocteva Agriscience.

Anwar. (2004). Analisis Daya Saing Komoditi Rumput Laut Melalui Pendekatan Policy Analysis Matrix (Pam) Di Kabupaten Lombok Timur. *Agrimansion*, 5(1), 60–70.

Arfah, S. Y. C., Harianto, & Suharno. (2017). Daya Saing Dan Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Komoditi Kakao Di Sulawesi Tengah. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 11(1), 69–96. <https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.79>

Armia Fahriyah, R. Y. (2020). *Keunggulan Kompetitif Spesial Sebagai Strategi Keberlanjutan UKM di Era New Normal*. 7(1), 104–1010.

Asmara, R., & Ardhiani, R. (2015). Integrasi Pasar dalam Sistem Pemasaran Bawang Merah. *Agrise*, 10(3), 165–175.

Astuti, L. T. W., Daryanto, A., Syaukat, Y., & Daryanto, H. K. (2020). Efficiency Analysis of Shallot Farmer in Brebes, Central Java. *International Journal Of Research and Review*, 7(11), 551–558.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 tahun 2023 Tentang Harga Eceran Tertinggi Beras, (2023).

Baffes, J., & Koh, W. C. (2023). *NPK Fertilizer Price in The United States (CIF)-2023*. World Bank.

Bayzidnejad, D., Khodaverdizadeh, M., & Bonab, S. H. (2020). Comparative Advantage of Production and Measuring by the Policy Analysis Matrix (PAM). *AgEcon*, 11(1), 35–47.

Birhanu, F. Z., Tsehay, A. S., & Alemu Bimrew, D. (2022). Cereal production practices and technical efficiency among farm households in major “teff” growing mixed farming areas of Ethiopia: A stochastic meta-frontier approach. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2012986>

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

- BPS Sampang. (2017). *Kabupaten Sampang Dalam Angka 2017*. 279–284.
- Choiroh, A., Diartho, H. C., & Komariyah, S. (2020). Peranan Subsektor Tanaman Pangan Terhadap Perekonomian Jawa Timur: Pendekatan Input - Output. *Ekonomi Ekuilibrium*, 4(1), 17–26.
- Chowdhury, S. M. Z. I. (2020). Construction of a Policy Analysis Matrix (PAM) for Fruits and Vegetables Export Process in Bangladesh. *Turkish Research Journal of Academic Social Science*, 3(1), 11–21.
- Darmayanti, N. W. S., Winandi, R., & Tinaprilla, N. (2018). Analisis DayaSaing Jagung di Wilayah Sentra Produksi di Indonesia dengan Pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM). *Forum Agribisnis*, 8(2), 137–154.
- Darmayanti, N. W. S., Winandi, R., & Tinaprilla, N. (2019). Analisis DayaSaing Jagung Di Wilayah Sentra Produksi Di Indonesia Dengan Pendekatan Policy Analysis Matrix (Pam). *Forum Agribisnis*, 8(2), 137–154. <https://doi.org/10.29244/fagb.8.2.137-154>
- Darmayanti, N. W. S., Winandi, R., & Trinaprilla, N. (2019). Analisis DayaSaing Jagung Di Wilayah Sentra Produksi Di Indonesia Dengan Pendekatan Policy Analysis Matrix (PAM). *Forum Agribisnis*, 8(2), 137–154. <https://doi.org/10.29244/fagb.8.2.137-154>
- Darmayanti, Surya, N. W., Winandi, R., & Tinaprilla, N. (2018). Analisis DayaSaing Jagung Di Wilayah Sentra Produksi Di Indonesia Dengan Pendekatan Policy Analysis Matrix (Pam). *Forum Agribisnis*, 8(2), 137–154. <https://doi.org/10.29244/fagb.8.2.137-154>
- Darwis, V., & Supriyati, N. (2016). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>
- Didik Wahyudi, I. F. P. dan D. T. K. (2018). *Kajian Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Bawang Merah Di Kabupaten Sumenep*. 1(1), 366–376.
- Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian. (2022). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2022*.
- Dwiharto, P. (2020). *FACTORS AFFECTING THE AREA OF RISK MANAGEMENT DISCLOSURES Paulus*. 2(1), 1–12. <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scrip.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scrip.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
- Fidyansari, D., Hastuty, S., & Arianto, I. K. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi petani di Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. *Perbal*, 4(2), 1–13.
- Futon, A. F., & Ahmad, P. (2019). Perbandingan Pendapatan Usahatani Jagung

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

- Pioneer 35 Dengan Jagung Lokal Varietas Manding Di Desa Palokloan Kabupaten Sumenep. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Haryanto, L. I., Masyhuri, M., & Irham, I. (2018). Daya Saing Dan Sensitivitas Usahatani Jagung Di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Kawistara*, 8(3), 213–309. <https://doi.org/10.22146/kawistara.38363>
- Haryanto, L. I., Masyhuri, M., & Irham, I. (2019). Daya Saing Dan Sensitivitas Usahatani Jagung Di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Kawistara*, 8(3), 262. <https://doi.org/10.22146/kawistara.38363>
- Hendriyana, A. (2022). *Pupuk Ramah Lingkungan Wujudkan Ketahanan Pangan yang Kuat*. Universitas Padjadjaran.
- Hermawan, I. (2014). Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea Dan TSP Terhadap Produksi Padi Dan Capaian Swasembada Pangan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 5(1), 63–78. <http://setkab.go.id/artikel-11423-.html>,
- Hermawan, I. (2017). Analisis Daya Saing Komoditas Pertanian dan Bahan Pangan Indonesia di Pasar Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. *Kajian*, 22(2), 15–31.
- Hidayari, N. I., & Aji, T. S. (2017). Analisis Daya Saing Apel Jawa Timur (Studi Kasus Apel Batu, Nongkojajar dan Poncokusumo). *Agromix*, 8(1), 36–49. <https://doi.org/10.35891/agx.v8i1.563>
- Hoque, F., Afrin, S., Akter, A., Khatun, M., Beg, T. H., Afrin, T., & Yoezer, K. (2021). Measuring technical efficiency of the cauliflower cultivation in Bangladesh: A case study on Dhaka district. *Journal of Applied Horticulture*, 23(1), 54–58. <https://doi.org/10.37855/jah.2021.v23i01.11>
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, 1 (2022).
- Informatika, D. K. dan. (2022). *Data Statistik Sektor Kabupaten Sumenep Tahun 2022*.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Praktik Hortikultura Yang Baik*.
- Kurniawan, H., Elpawati, & Aminudin, I. (2021). Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Budidaya Kopi Arabika Organik Terintegrasi. *Agri Sains*, 5(1), 167–176.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Indonesia Masih Impor Komoditas Pangan, ini daftarnya*.
- Lestari, S. P., Aring Hepiana Lestari, D., & Abidin, Z. (2022). Dampak Kebijakan Input Terhadap Daya Saing Usahatani Jagung Di Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Agriculture and Animal Science*, 2(1). <https://doi.org/10.47637/agrimal.v2i1.512>

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

- Lestari, S. P., Lestari, D. A. H., & Abidin, Z. (2020). Analisis daya saing usahatani jagung di Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Food System and Agribusiness*, 4(2), 66–75.
- Maharani, N., Koestiono, D., & Dwiastuti, R. (2015). Analisis Keunggulan Komparatif Komoditas Jagung (*Zea mays* L.) Di Kabupaten Kediri. *Agrise*, 14(3), 1412–1425.
- Mantau, Z. (2016). Daya Saing Komoditas Jagung Indonesia Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 35(2), 89. <https://doi.org/10.21082/jp3.v35n2.2016.p89-97>
- Martadona, I., & Maifianti, K. S. (2019). Analisis Daya Saing Komoditas Unggulan Tanaman Pangan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Bisnis Tani Universitas Teuku Umar*, 5(2), 85–92.
- Marwanti. (2022). *PENURUNAN VOLUME PUPUK BERSUBSIDI TERHADAP PRODUKTIVITAS PADI LAHAN KERING*.
- Melia, F., Aldian, F. M., Pahlevi, M. S. F., Risqullah, R. N. I., & Oktaffiani, S. (2023). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Volume Ekspor Jagung. *Jurnal Economina*, 2(1), 1305–1320. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.287>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03.2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu*.
- Miriti, P., Otieno, D. J., Chimoita, E., Bikketi, E., Njuguna, E., & Ojiewo, C. O. (2021). Technical efficiency and technology gaps of sorghum plots in Uganda: A gendered stochastic metafrontier analysis. *Heliyon*, 7(1), e05845. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05845>
- Naully, D. (2019). Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Produsen Dan Konsumen Beras Di Indonesia. *Jurnal AGROSAINS Dan TEKNOLOGI*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.24853/jat.4.1.40-55>
- Nolasary, M. P. (2019a). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Bawang Merah di Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(4), 1–8.
- Nolasary, M. P. (2019b). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Bawang Merah di Kabupaten Solok. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(4), 1–8.
- Perdagangan, K. P. H. B. P. P. D. P. D. dan I. (2022). Analisis Perkembangan Harga Bahan Pokok Di Pasar Domestik dan Internasional. In *Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri*.
- Prasekti, Y. H., & Krisanti, A. (2018). Analisis daya saing agribisnis bawang merah (*Allium Cepa* L.) Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita-Oktober*, 1(1), 1–10.
- Prasetyo, D. D., & Fauziyah, E. (2020). Efisiensi Ekonomi Usahatani Jagung Lokal Di

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

- Pulau Madura. *Agriscience*, 1(1), 26–38.
<https://doi.org/10.21107/agriscience.v1i1.7505>
- Pratama, A. F. A. (2023). Analisis Evaluasi Kebijakan PERMENTAN No. 10 Tahun 2022 di Kampung Kotagajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Socia Logical*, 3(1), 1–8.
- Pratama, R. A., Kusrimi, N., & Maswadi. (2022). Analisis Daya Saing Usahatani Jagung Pipil Di Desa Rasau Jaya I. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(4), 1439–1449.
- Pratama, R. A., Kusrini, N., & Mawadi. (2022). Analisis Daya Saing Usahatani Jagung Pipil Di Desa Rasau Jaya I. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 6(4), 1439–1449.
- Priyo Wicaksono, Ratya Anindita, S. M. (2017). Analisis Daya Saing Bawang Merah Kabupaten Kediri. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis(JEPA)*, 1(2), 2598–8174.
- Puspita Devi, A., Husaini, M., Septiana Prodi Agribisnis, N., Sep, J., Pertanian -Univ Lambung Mangkurat, F., & -Kalimantan Selatan, B. (2020). *Analisis Daya Saing Komoditas Jagung Di Kabupaten Tanah Laut*. 4(3), 68–75.
- Radiansyah, D., Radian, & Nurliza. (2022). Analisis Keunggulan Komparatif Dan Kompetitif Serta Implikasi Kebijakan Pemerintah Pada Komoditas Jagung Di Kabupaten Bengkayang. *Agrologia*, 19(1), 17–24.
<https://doi.org/10.24929/fp.v19i1.1985>
- Rahmadona, L., Fariyanti, A., & , B. (2017). Daya saing Komoditas Bawang Merah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. *Jurnal Hortikultura Indonesia*, 8(2), 128.
<https://doi.org/10.29244/jhi.8.2.128-135>
- Rahmaniyah, F., & Rum, M. (2020). Analisis Daya Saing Jagung Hibrida Unggul Madura Mh-3 Di Kabupaten Bangkalan. *Agriscience*, 1(2), 367–382.
- Rondhi, M., & Ridjal, J. A. (2018). Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian. *Modul*, 55–59.
- Santoso, A. B., Nurdin, M., & Hidayah, I. (2020). Daya Saing Bawang Merah di Provinsi Maluku dan Upaya Peningkatannya. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(3), 365–372. <https://doi.org/10.18343/jipi.25.3.365>
- Sari, R. N., Wahyudi, D., & Awiyanto, D. (2015). Preferensi konsumen terhadap bawang merah varietas lokal di Kabupaten Sumenep. *Cemara*, 11(1), 26–33.
- Septiana, B., Kusnadi, N., & Fariyanti, A. (2022). Daya saing bawang putih di indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 40–52.
- Setiawan, K., Hartono, S., & Suryantini, A. (2014). Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa Di Kabupaten Kupang. *Agritech*, 34(1), 88–93.
- Setiawati, R. I. S. (2021). Bisnis dan Perdagangan Internasional. In *Buku Ajar Bisnis Dan Perdagangan Internasional*.

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

- Sholihah, N. F., & Saputro, T. B. (2016). Respon Tanaman Jagung (*Zea mays* L.) Varietas Mending terhadap Cekaman Salinitas (NaCl) Secara In Vitro. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 5(2), 60–66.
- Siallagan, J. O., Chalil, D., & Jufri, M. (2014). Analisis Efisiensi Penggunaan Pupuk Bersubsidi Pada Tanaman Padi Sawah. *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*, 1–10.
- Skevas, T., & Serra, T. (2016). The role of pest pressure in technical and environmental inefficiency analysis of Dutch arable farms: an event-specific data envelopment approach. *Journal of Productivity Analysis*, 46(2–3), 139–153. <https://doi.org/10.1007/s11123-016-0476-0>
- Ślusarczyk, B., & Grondys, K. (2019). Parametric conditions of high financial risk in the SME sector. *Risks*, 7(3), 1–17. <https://doi.org/10.3390/risks7030084>
- Sofyan, D. A. (2022). *TANTANGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI DAN PERAN PUPUK BERSUBSIDI*.
- Soleh, M. I. (2020). *Penggunaan Pestisida dalam Perspektif Produksi dan Keamanan Pangan*. Kementerian Pertanian.
- Sosial, P., Dan, E., Pertanian, K., Jenderal, S., & Pertanian, K. (2017). *Kajian Kebijakan Subsidi Pupuk*.
- Sudrajat, A. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 199–112.
- Sukmaya, S. G., & Rachmina, D. (2016). *Analisis Daya Saing Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kedelai vs Pengusaha Kedelai di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur*. 2(1), 21–52.
- Sukmaya, S. G., Rachmina, D., Magister, P., Agribisnis, S., & Agribisnis, D. (2016). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kedelai VS Pengusaha Kedelai Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. *Forum Agribisnis*, 6(1), 21–52.
- Sukmaya, S. G., Rachmina, D., & Saptana. (2016). Analisis Daya Saing Dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Kedelai VS Pengusaha Kedelai Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. *Forum Agribisnis*, 6(1), 21–52.
- Suparmin, Dipokusumo, B., Siddik, M., & Zaini, A. (2022). Dampak Penerapan Kebijakan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani di Kecamatan Narmada. *Prosiding SAINTEK LPPM Universitas Mataram*, 1(November 2021), 54–63.
- Suryana, A., & Agustian, A. (2016). Analisis Daya Saing Usaha Tani Jagung di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.21082/akp.v12n2.2014.143-156>
- Tuminem, F. (2019). Peranan Komoditas Tanaman Pangan Unggulan terhadap

Kebijakan Subsidi Pupuk : Perspektif Efisiensi & Daya Saing

- Kesempatan Kerja dan Pendapatan di Kabupaten Sukoharjo (Analisis Input-Output). *Jurnal Pangan*, 27(3), 203–214. <https://doi.org/10.33964/jp.v27i3.397>
- Wanto, H. S. (2017). Analisis Daya Saing Jagung Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 1, 434–441.
- Wati, H. D., Ekawati, I., & Ratna, P. (2022). Keragaman Genetik Dan Heritabilitas Karakter Komponen Hasil Jagung Varietas Lokal Sumenep. *Jurnal Pertanian Cemara*, 19(1), 85–94. <https://doi.org/10.24929/fp.v19i1.1985>
- Wibisono, E., Amir, A., & Zulfanetti, Z. (2019). Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Jambi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 3(2), 105–116. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.2.105-116>
- Widiastuti, M. C., Anggiani, S., & Ekawanto, I. (2021). *Bisnis Internasional: Teori dan Pemahaman*.
- Widyasmita, S., & Suprpti, I. (2020). Strategi Nafkah Petani Jagung Lokal Madura (Studi Kasus Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep). *Jurnal Pertanian Cemara*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/10.24929/fp.v17i2.974>
- Winta Noi, Echan Adam, & Yuliana Bakari. (2023). Analisis Revealed Comparative Advantage dan Daya Saing Komoditas Jagung di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Triton*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.47687/jt.v14i1.288>
- Zuhri, N. M., Prasetyono, B. W. H. E., & Yuniarto, V. D. (2020). Analisis Daya Saing Usahatani Jagung di Kabupaten Grobogan. *AGROMEDIA*, 38(1). <https://doi.org/10.47728/ag.v38i1.273>
- Zulaiha, A. R., Nurmalina, R., & Sanim, B. (2018). Kinerja Subsidi Pupuk di Indonesia. *Journal of Business and Management Applications (JABM)*, 4(2), 271–271.
- Zulfa, I., & Hariyani, T. (2022). Implementation of the 7P Marketing Mix in Increasing Sales Volume of Powerful SMES in Kediri Regency During the Covid- 19 Pandemic. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(1), 299–314.